

BENARKAH BUNG KARNO TERLIBAT G30S/PKI?

Kudeta 1 Oktober 1965
Sebuah Studi tentang Konspirasi
Victor M. Fic (Yayasan Obor Indonesia; 2008)

Kudeta 1 Oktober 1965 - Sebuah Studi tentang Konspirasi, demikian judul buku setebal 447 Halaman karya Victor M. Fic yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia diterbitkan Yayasan Obor Indonesia pada 2008. Buku ini mengejutkan banyak pihak, utamanya para Indonesianis dan sejarawan Indonesia, karena isinya membuka tabir gelap salah satu titik paling kelam dalam sejarah nasional Indonesia. Betapa tidak, penulisnya adalah Profesor Emeritus dari Jurusan Ilmu Politik Brock University, Kanada, setelah mempelajari fakta dan bukti yang diperolehnya dengan sangat gamblang berkesimpulan bahwa Soekarno terlibat G30S/PKI atau lebih dikenal sebagai Gestapu.

Tentu saja, kesimpulan Fic menimbulkan kehebohan di Indonesia. Selama ini, terkait dengan peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia itu, para ilmuwan maupun sejarawan cenderung menghindari pembahasan yang mendalam tentang posisi Presiden dalam peristiwa Gestapu. Setidaknya, para ilmuwan dan sejarawan lebih memilih pasif begitu sampai pada topik ini. Bahkan ada yang bersikap menolak dengan argumentasi: "Gak mungkin lah presiden mengkudeta dirinya sendiri."

Saat ini, sekurang-kurangnya ada tiga teori sebab peristiwa Gestapu: Pertama, terjadinya polarisasi di lingkungan Angkatan Darat, atau

lebih dikenal sebagai "masalah internal Angkatan Darat." Dimana para perwira "progresif-revolusioner" yang muda dan junior memukul komandan puncak "reaksioner" dari Angkatan Darat yang dituduh telah bersekongkol dengan pihak asing untuk menggulingkan Presiden Soekarno karena kebijakan-kebijakan progresifnya. Dalam teori ini, Gestapu hanya memainkan peran tambahan saja, dengan mengambil keuntungan dari perkembangannya dengan jalan mendukung mereka yang progresif-revolusioner. Teori ini dikembangkan oleh Benedict R.O.G. Anderson dan Ruth T. Mc Vey dalam makalah yang dikenal sebagai Cornell Paper (1971).

Teori Kedua, Peristiwa Gestapu direncanakan oleh suatu konspirasi bersama Amerika-Inggris untuk menghentikan laju Indonesia ke arah komunisme dengan menggulingkan Presiden Soekarno dan menghancurkan PKI sekaligus. Teori ini menuduh bahwa Inggris dan Amerika telah mendorong "teman-teman" mereka di jajaran puncak Angkatan Darat untuk melakukan suatu kudeta militer guna mencapai tujuan-tujuan mereka. Tujuan yang dimaksud ialah mendirikan kediktatoran militer. Menurut teori ini, Gestapu hanyalah fase pertama dari tiga fase kudeta sayap kanan, yang menghabisi saingan-saingannya di pusat AD, dilanjutkan kemudian menghabisi kaum kiri sipil, untuk selanjutnya mendirikan diktator militer. Teori ini dikembangkan antara lain oleh Peter Dale Scott dari University of British Columbia, Kanada dalam papernya yang dimuat di Pacific Affairs (1985). Di Indonesia teori ini kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Asvi Warman Adam sebagai Teori Kudeta Merangkak.

Teori ketiga, Gestapu memang diatur oleh PKI sebagai jalan pintas untuk langsung berkuasa di Indonesia. Pada pertengahan Agustus 1965 Politbiro PKI mengambil keputusan untuk mengadakan kudeta

pre-emptive sebagai sebuah tindakan darurat karena dua alasan, yakni kemungkinan Presiden Soekarno meninggal tiba-tiba atau lumpuh permanen setelah jatuh pingsan pada tanggal 4 Agustus 1965. Alasan berikutnya, Mao Zedong telah mendesak Aidit pada tanggal 5 Agustus 1965 untuk cepat bergerak dengan sebuah pukulan *pre-emptive* memenggal komando puncak AD untuk mengenyahkan pesaing utamanya dalam menuju kekuasaan dan menggantikan Presiden dengan seorang kandidat dari PKI, namun sedapat mungkin bukan seorang anggota partai. Teori ini dikembangkan oleh Nugroho Notosusanto dalam bukunya *The Coup Attempt of the "September 30 Movement" in Indonesia (1968)*.

Pada bagian pendahuluan buku ini, Victor M. Fic mematahkan argumentasi teori pertama dan kedua dengan menunjukkan sejumlah bukti yang sekaligus menjadi basis dari teori baru asal-usul Gestapu. Menurutnya, asal-usul Gestapu dimulai dari perintah Presiden Soekarno untuk membersihkan komando puncak AD yang diberikan kepada Untung pada tanggal 4 Agustus 1965, disusul tiga rapat politbiro PKI pada bulan Agustus 1965 untuk secara *pre-emptive* melakukan kudeta sebagai jalan pintas untuk langsung memegang kekuasaan, ini memperkuat kebijakan PKI sebelumnya yang melakukan penetrasi ke tubuh Angkatan Bersenjata melalui kegiatan Biro Chusus sejak tahun 1964, dilanjutkan dengan mendirikan "Komando Pembersihan" di bawah Untung yang komposisinya dengan tepat sekali terdiri dari para perwira revolusioner untuk memotong kepala Angkatan Darat. Sementara itu, Fic juga menolak teori kedua dengan menunjukkan bukti berupa dokumen CIA No. 18 dan 19 yang intinya menyatakan bahwa CIA tidak memiliki aset-aset alias sumber daya di Indonesia untuk melakukan "kudeta" secanggih itu.

Lebih lanjut, Dalam buku yang aslinya berjudul ***Anatomy of the Jakarta Coup: October 1, 1965: The Collusion with China which Destroyed the Army Command, President Sukarno and the Communist Party of Indonesia (2003)*** Victor M. Fic menyampaikan sejumlah bukti yang memperkuat argumentasinya itu. Bukti-bukti tersebut bukan saja yang sudah lazim beredar terkait peristiwa itu seperti dokumen pengadilan MAHMILLUB, Dokumen CIA, suratkabar Indonesia terbitan tahun-tahun 1965-1966, namun juga wawancara langsung dengan sejumlah tokoh yang dilakukannya pada tahun 1968 saat menjadi *visiting professor* di Nanyang University di Singapura. Hasil penelitian pada tahun itu dituangkannya dalam makalah berjudul ***The September 30 Movement in Indonesia, 1965, A Gambler that Failed*** dan dipresentasikan dalam *International Conference on Asian History* di Universitas Malaya, Kuala Lumpur pada Agustus 1968. Kelak, makalah ini menjadi titik pijak profesor ilmu Politik kelahiran Cekoslovakia tahun 1922 ini untuk merampungkan argumentasi dari teori barunya dalam sebuah buku yang diterbitkan di India berpuluhan-puluhan tahun kemudian tepatnya pada 2003. Lima tahun kemudian, Yayasan Obor Indonesia menerbitkan buku tersebut dengan judul Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi (2008). Dalam Prakata Penulis dari buku ini, Fic menyatakan bahwa: "Buku ini merupakan jilid terakhir dari serial tiga jilid tentang studi saya yang berjudul ***INDONESIA: the origin and evolution of its Pluralism From the Hindu -Buddhist Era, Through the Islamic Period to Modern Secular State***. Buku ini menjelaskan ancaman yang paling serius terhadap sifat pluralisme dari masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh upaya Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengambil alih kekuasaan pada 1 Oktober 1965. Meski tentara di bawah Mayjen Suharto telah menggagalkan upaya itu,namun seandainya kudeta itu berhasil maka tidak dapat diragukan lagi bahwa suatu perang kelas yang intensif sudah pasti akan menghancurkan partai-partai politik,

organisasi-organisasi agama dan seluruh kelas sosial yang bertekad untuk menjaga pluralisme yang multifaset di negara itu.”

Uraian dalam Buku ini dibagi menjadi dua belas bab serta diawali dengan bab Pendahuluan dan diakhiri dengan bab Kesimpulan. Kata Pengantar dibuat oleh Dr. John O Sutter dari Democratic World Federation, California, Amerika Serikat yang menyatakan bahwa melalui buku ini Dr. Fic bukan saja menjelaskan “anatomi” kudeta itu dan mekaniknya, tetapi juga “psikologi” para pemainnya dengan cara memperlihatkan bagaimana mereka saling berinteraksi, sehingga seolah menjadikan keseluruhan drama kudeta itu sebuah lakon wayang kulit.” (Hal. xvii).

Buku juga dilengkapi dengan Daftar Dokumen, Daftar Gambar dan Peta, Prakata Penulis, serta ucapan terima kasih, dengan sejumlah catatan, dan biodata lengkap penulis. Peta I Pangkalan Udara Halim merupakan bagian kunci bagi pembaca untuk memahami isi buku secara ruang dan waktu, mengingat sebagian besar peristiwa yang dipaparkan dalam buku ini terjadi di sekitar wilayah itu. Pembaca bisa membayangkan pergerakan para tokoh utama yang sibuk sepanjang hari bersejarah di lokasi ini. Sedangkan Peta II Lapangan Medan Merdeka memberi panduan kepada pembaca tentang setting penting berikutnya dimana aksi-aksi nyata kudeta tercermin dari pergerakan pasukan berusaha menguasai sejumlah fasilitas vital di lokasi ini serta aksi penangkalnya. Kedua peta ini dilengkapi dengan sejumlah foto-foto yang memperjelas penggambarannya seperti gedung Pusat Survei Nasional (PENAS) yang menjadi Central Komando (Cenko) I dari kelompok PKI, rumah Sersan Udara Anis Sujatno yang tempat para tokoh Kudeta berkumpul (Markas Besar GESTAPU), rumah sersan Udara Suwardi di Halim yang menjadi Markas Besar Aidit, dan Rumah D-1 Komodor Udara Susanto yang menjadi markas besar Presiden Soekarno pada hari paling kelam dalam

sejarah bangsa Indonesia itu. Ada pula foto Lubang Buaya, Rumah tempat para Pahlawan Revolusi disiksa oleh Pemuda Rakyat dan Gerwani, serta Pusat Komando Operasi Halim, markas dari Omar Dhani. Serta lima tokoh penting terkemuka PKI yang memainkan peran penting dalam drama penuh darah itu yakni D.N. Aidit, Lukman, Nyoto, Sakirman, dan Sudisman.

1

OFFENSIVE REVOLUSIONER 1964-1965

Bagian pertama buku ini dibuka dengan bahasan tentang landasan teoritis yang menjadi dasar bagi rencana PKI melakukan Gerakan 30 September 1965 atau juga dikenal sebagai Gerakan 1 Oktober 1965 (GESTAPU). Fic menunjuk pada Laporan Politik ketua PKI DN Aidit kepada Sidang Pleno ke-IV CC PKI bertanggal 11 Mei 1965. Fic mengutip pidato Aidit: "Dewasa ini Indonesia menemukan dirinya dalam sebuah situasi revolusioner yang semakin meningkat dan semakin matang. Tugas kita sekarang ini adalah mengadakan ofensif revolusioner, terus mengembangkan situasi revolusioner, dan mematangkannya." (Hal. 52) Menurut Fic ketika PKI memutuskan untuk meningkatkan offensif revolusioner itu guna mencapai perubahan mendasar dalam konstelasi kekuatan-kekuatan dalam badan tertinggi kekuasaan negara, yaitu mengubah Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Gotong Royong, maka masalah tersebut dipandang dari segi praktisnya akan direduksi sehingga menjadi pilihan sarana, strategi, taktik dan waktu yang tepat.

Hal lain yang menjadi faktor penting yang melatar Gestapu ialah berubahnya poros PKI dari Moskow ke Peking tahun 1964. Diungkapkan oleh Fic bahwa sebelumnya PKI mengikuti konsep strategi Moskow yaitu "Transisi damai menuju komunisme", strategi yang dirintis dan berhasil diterapkan di sejumlah negara di Eropa Tengah dan Timur

pasca Perang Dunia II. Strategi ini berusaha diterapkan di Indonesia oleh PKI dengan jalan mendirikan pemerintahan Demokratis Nasional yang akan diwujudkan dalam bentuk Kabinet Gotong Royong. Namun ketika terjadi skisma (perpecahan kecil) antara Moskow dan Peking mengenai ajaran dan strategi besar komunisme, PKI memindahkan kepatuhannya dari Moskow ke Peking pada 1963-1964 dengan memunculkan gagasan Revolusi Agraria sebagai jalan menuju kekuasaan.

Sebelumnya, seperti ditunjukkan oleh Fic dari hasil Kongres ke-VII PKI pada 1962 PKI menghadapi pilihan untuk menerapkan strategi transformasi damai menuju komunisme di Indonesia, Pada mulanya PKI mengikuti pengalaman PK Cekoslovakia tahun 1947-1948. untuk tujuan itu, PKI tidak hanya melakukan pengendalian terhadap ormas-ormas yang kuat di negeri itu, tetapi juga secara sistematis melakukan penetrasi alias penyusupan ke dalam kementerian-kementerian pemerintah, berbagai organisasi umum dan khusus, dan menyusupi keempat cabang Angkatan Bersenjata. Namun, " menghadapi TNI-nya Nasution, metoda ini tidak jalan." Juga kemajuan menyusup ke dalam angkatan bersenjata sangat lambat dan karena itu, demikian Sjam, "Jelas bahwa cara Ceko itu tidak dapat digunakan PKI" (Hal. 56).

PKI memilih konsep kedua yang disampaikan oleh Aidit dalam sidang Pleno ke-2 CC PKI pada Desember 1963. Konsep ini menolak gagasan Moskow sebaliknya mengajukan bahwa revolusi Indonesia itu pada dasarnya bersifat agraris, bahwa kekuatan utamanya haruslah merupakan suatu pemberontakan bersenjata dari kaum tani, dan strateginya menghendaki dikepungnya kota-kota oleh desa-desa, dan dihancurnyanya semua aparat negara yang lama. Konsep itu membayangkan kekerasan revolusioner dalam skala besar, yang tidak hanya mengubah kabinet guna membuka jalan secara langsung untuk

mendirikan "diktatur proletariat". Menurut Fic, inilah saripati dari perjalanan Mao menuju kekuasaannya, yang mencoba diadaptasi oleh PKI.

Para pemimpin Cina terbukti sangat tertarik dengan kemungkinan ini dan menawarkan bantuan untuk mengembangkannya. Chou En Lai mengusulkan kepada Sukarno pada Januari 1965 bahwa sekira 21 juta petani dipesenjatai untuk membentuk "Angkatan Kelima". Peking akan membantu mempersenjatainya. Namun Angkatan Darat menolak sama sekali usulan ini, termasuk usulan Sukarno membentuk "Tentara rakyat" yang disampaikannya pada konferensi tahunan para panglima daerah Angkatan Darat yang digelar di Lembaga Pertahanan Nasional -Jakarta pada Mei 1965. AD juga menolak usulan Aidit untuk mengorganisasi "Nasakomisasi" angkatan bersenjata dengan memperkenalkan Commisioner politik ke dalam struktur komando angkatan bersenjata.

Dalam diskusi internal di Biro Politik PKI yang intensif pada Mei-Juni 1965 terkait usaha menjalankan kebijakan offensif revolusioner dengan mendapatkan alat perlengkapan, strategi dan taktik yang akan digunakan mereka berkesimpulan bahwa sedikit sekali prospeknya bagi PKI untuk mencoba mengorganisir pemberontakan agraris di negeri ini. Sjam memberi kesaksian bahwa; "PKI mempertimbangkan tahun 1970 sebagai target waktu yang mungkin, dimana ketika itu semua hal yang diperlukan telah siap untuk sebuah revolusi agraris di negeri itu." (Hal. 59-60).

2

PKI MENGINFILTRASI ANGKATAN BERSENJATA 1964-1965

PKI semakin meyakini bahwa AD merupakan kubu pertahanan dari kekuatan-kekuatan "anti-rakyat", yang berusaha membendung usaha PKI dalam meraih kekuasaan. Meski angkatan bersenjata, khususnya AD, telah menjadi target penetrasi mata-mata PKI sejak lama, baru pada permulaan tahun 1964 PKI melakukan usaha serentak untuk mengintensifikannya. Ini dilakukan dengan mendirikan Biro Chusus (BC) yang langsung bertanggung jawab kepada Aidit sebagai ketua umum PKI. Politbiro menyetujui pembentukan BC dengan merujuk kepada anggaran dasar Partai Pasal 70 yang menyatakan: "Jika karena perkembangan situasi, partai tidak mampu berfungsi secara normal, maka bentuk-bentuk organisasi dan metode bekerjanya partai harus ditentukan oleh Komite Sentral.

Biro Chusus berdiri pada awal tahun 1965 dengan struktur organisasi terdiri dari Biro Pusat di Jakarta berisi 8 orang (Aidit, Sjam, Pono, Walujo, Ramin, Sujono, Pradigdo, Ismail, dan Sugando), serta 12 Biro daerah (Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Aceh, dan Riau) dengan 36 anggota, dengan Aidit sebagai juru bicara. Mereka dilatih kemampuan khusus untuk menyusup dan selain juru bicara tak ada yang diperbolehkan tampil di depan publik. Mereka

didanai secara khusus, bekerja di lembaga terpisah sebagai kamuflase dengan nama-nama samaran. Target utama mereka adalah menginfiltrasi Angkatan Darat.

Fic menyebutkan bahwa Biro Chusus pada awal tahun 1965 mulai meletakkan dasar-dasar perlawanannya terhadap komando puncak AD yang terdiri dari empat operasi yakni: (1) mencemarkan komando AD dengan tuduhan terlibat konspirasi menentang Republik Indonesia, karena bekerjasama dengan Inggris dan Amerika Serikat, (2) menuduh komando puncak AD telah mendirikan "dewan Jenderal" yang bertujuan menggulingkan Presiden Sukarno, (3) mengorganisir kalangan perwira militer yang tidak puas serta kelompok-kelompok oposisi yang akan bertindak melawan Dewan Jenderal dan menjaga Presiden dalam menghadapi rencana-rencananya; dan (4) mengisolir komando AD dari angkatan lain, terutama dengan memenangkan kerjasama AURI dalam menghadapi AD. (Hal. 65)

Dalam kerangka itulah, Fic menyebut munculnya Dokumen Gilchrist, sebuah kampanye disinformasi dengan kode Operasi Palmer, yang memalsukan surat-surat yang tujuannya mengenyahkan kepentingan Amerika dari Indonesia. Dilanjut dengan munculnya hoaks di bulan April 1965 tentang Dewan Jenderal yang diinisiasi oleh Aidit dengan sasaran lima jenderal terkemuka yakni Jenderal A.H. Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, Sukendro, dan S. Parman. Mereka dituduh merencanakan kudeta terhadap Presiden. Sementara M.T. Harjono, Sutojo, dan D.I. Panjaitan dituduh tidak loyal kepada Presiden dan memiliki sifat anti-komunis yang fanatik. Hoaks itu berhasil mengenai sasaran. Presiden Sukarno beraaksi dan menggelar rapat Komando Operasi Tertinggi (KOTI) di Istana Merdeka 26 Mei 1965 dan dihadiri panglima dari kempat angkatan. Presiden langsung bertanya kepada Panglima AD, Ahmad

Yani menampik tuduhan tersebut dan menyebut bahwa yang dimiliknya adalah sebuah dewan untuk mengajukan rekomendasi tentang kenaikan pangkat para perwira senior yakni WANJAKTI.

Namun Dr. Subandrio, menggunakan dua peristiwa itu untuk mulai mengembangkan teori konspirasi dengan mengaitkan isi dokumen Gilchrist dengan Dewan Jenderal. PKI mengundang Dr. Subandrio untuk bicara dalam rapat raksasa perayaan Hari Jadi ke-45 PKI. Dr. Subandrio mengatakan bahwa Presiden telah memiliki "bukti-bukti dokumentasi" dari sebuah konspirasi kontra-revolusioner yang tidak lama lagi akan merongrong Indonesia dan menyerang Presiden secara pribadi. (Hal. 69)

Langkah selanjutnya, PKI yang berhasil merekrut tidak kurang dari 700 personil angkatan bersenjata membentuk kelompok-kelompok konspirasi beranggotakan para perwira menengah yang tidak puas atau termotivasi secara ideologis untuk menggagalkan rencana kekuatan asing mengganggu kedaulatan Indonesia serta menjaga presiden dari upaya Dewan Jenderal. Mereka inilah yang disebut perwira progresif revolucioner. Dalam pembentukannya PKI menerapkan sistem sel, dengan metode "sistem tiga orang" atau "Sistem pembangunan sel." Menurut Sjam, yang diwawancara Fic, mengemukakan bahwa Biro Chusus berhasil merekrut 400-500 orang dalam AD, 30-40 orang di AL, dan 40-50 orang di AURI. Dari mereka muncul nama-nama Letkol Infanteri Untung bin Sjamsuri (Pasukan Pengawal Istana- Tjakrabirawa), Mayjen Pranoto Reksosamudro, Brigjen Mustafa Syarif Supardjo, Kolonel Latief, yang memainkan peran penting dalam Gestapo.

Persaingan yang sudah lama mencengkeram Angkatan Bersenjata menjadi faktor penting lainnya. Angkatan Darat dicap sebagai "kekuatan reaksioner" dan karenanya terpisahkan dari angkatan-angkatan

lainnya yang mendukung revolusi Bung Karno. AURI mengambil sikap memusuhi AD, dan menyekutukan dirinya dengan posisi PKI dalam segala perkara yang penting saat itu. Marsekal Muda Udara Leo Wattimena memberi kesaksianya, Komando AURI pernah mengadakan sebuah rapat di Tjiboro dalam bulan Juli 1965, di mana dibicarakan hubungan antara Dokumen Gilchrist dan keberadaan Dewan Jenderal serta rencana-rencananya. Rapat itu memutuskan bahwa Dewan Jenderal adalah sebuah konspirasi kontra revolusioner, dan bahwa AURI adalah sebuah kekuatan progresif yang akan berdiri bersama dengan kekuatan-kekuatan revolusioner, sekiranya meletus sebuah pergolakan dalam negeri. Rapat itu juga membicarakan Presiden Sukarno dan masa depannya, dan memutuskan bahwa jika terjadi sesuatu padanya maka Omar Dhani akan menggantikannya karena ia didukung oleh seluruh kekuatan progresif, yang berarti PKI dan sekutu-sekutunya. (Hal. 72)

3

INDONESIA DALAM STRATEGI CINA

1965

Bab ini dibuka dengan uraian tentang keikutsertaan Aidit dalam rombongan Presiden Sukarno yang hendak menghadiri Konferensi Asia Afrika II di Al Jazair pada Juni 1965. Konferensi itu sendiri gagal dilaksanakan, menyusul kudeta yang dilakukan di Al Jazair, dan diundur menjadi tanggal 5 November 1965. Alih-alih mengikuti Presiden pulang ke tanah air, Aidit justru memisahkan diri dari rombongan dan melakukan perjalanan ke beberapa negara komunis, hingga akhirnya mendarat di Peking.

Presiden Sukarno kembali ke tanah air dalam kondisi kesehatan yang menurun akibat penyakit ginjalnya yang semakin serius. Pada 4 Agustus 1965 Presiden mendapat serangan yang sangat gawat, ia muntah-muntah sebelas kali dan hilang kesadaran empat kali. Dr. Maher Mardjono, profesor Neurolog Universitas Indonesia langsung dipanggil. Ketika ia masuk ke kamar Presiden, sebuah tim yang terdiri dari delapan dokter dari Cina telah lebih dahulu bekerja; mereka telah merawatnya sejak tanggal 22 Juli hingga 1 September 1965. Serangan itu demikian seriusnya sehingga spekulasi pun menyebar bahwa kematian Presiden sudah tak lama lagi.

Respon paling awal datang dari AURI. Konon Untung lah yang pertama kali menyampaikan gosip itu kepada Omar Dhani. Dhani pun menggelar

rapat pada 5 Agustus 1965 untuk menentukan posisi AURI dalam situasi gawat itu. Merujuk kepada hasil pertemuan sebelumnya di Tjoboro maka rapat pun memutuskan untuk mendirikan sebuah komando waspada yang diberi nama Komando Operasi Utuh, untuk menjaga persatuan negeri dan kepentingan AURI. Inilah mobilisasi pertama yang dilakukan dalam menyikapi situasi yang makin genting itu.

Dalam mempersiapkan peringatan Hari Kemerdekaan 1965 Presiden Sukarno melalui Menteri Luar Negeri Subandrio memanggil pulang Aidit yang sedang berada di Peking. Aidit mengetahui kondisi kesehatan Presiden Sukarno yang semakin gawat. Aidit diketahui bertemu dengan Mao Ze Dong dan para pemimpin senior Cina membahas perihal itu dan mendiskusikan langkah-langkah masa depan. Keduanya membahas posisi Presiden Sukarno pada fase transisi setelah revolusi dan Mao menyarankan Presiden Sukarno harus pensiun atau dipensiunkan, untuk kemudian digantikan oleh seseorang yang "bukan komunis" sedangkan Aidit nantinya memegang jabatan "perdana menteri" yang mengendalikan seluruh lini kekuasaan. Dalam konteks inilah, muncul skenario sebagaimana diungkapkan kepada Dr. Subandrio oleh Marsekal Chen Yi yang mengunjungi Jakarta untuk menghadiri perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 1965 bahwa Peking siap menyambut Presiden Sukarno dan bahwa dirinya telah menemukan sebuah tempat yang tenang baginya di Danau Angsa, Cina.

Sebelum berpisah, Aidit mendapatkan janji Mao yang akan memasok 30.000 pucuk senjata untuk memukul jenderal reaksioner, dan mengirim dengan kapal laut sejumlah besar senjata untuk perlengkapan Angkatan Kelima. Inilah saripati dari pesan Mao yang hendak disampaikan kepada Sukarno melalui Aidit sebagai sebuah perjanjian rahasia sebagaimana diungkap Fic bersumber dari surat Aidit tanggal 10 November 1965.

Audit tiba di tanah air pada 7 Agustus 1965 bersama sejumlah tokoh PKI yang berkunjung ke beberapa negara komunis lainnya. Bersamanya ikut serta dua dokter, yang menurut Fic satu atau dua-duanya tidak lain adalah agen intelijen yang memberi informasi terus menerus ke Peking. Hari itu juga Audit langsung menemui Presiden Sukarno di Istana Bogor melaporkan perjalanannya. Namun, Audit ternyata datang lagi keesokan harinya, tanggal 8 Agustus 1965. Audit dan Sukarno bertemu berdua saja di kamar pribadi. Meski tak ada dokumen tertulis tentang isi pertemuan, Fic meyakini pertemuan yang berlangsung cukup lama itu membahas pokok-pokok utama pesan Mao. Keyakinan Fic merujuk kepada surat Audit kepada para kader PKI tanggal 10 Nopember 1965 yang menunjuk pada jatuhnya "hukum karma" atas presiden, dan bahwa Presiden bila perlu akan dikorbankan, seandainya ia ingkar memenuhi janjinya kepada Mao dan Audit.

Fic menganalisis Presiden tampaknya menerima persyaratan Mao, dengan menyodorkan tiga bukti yang terjadi secara berturut-turut lewat peristiwa-peristiwa yang menyusul kemudian. Pertama, Setelah Audit pulang Presiden segera memanggil Brigjen Sabur dan Kolonel Untung dan bertanya kepada Untung apakah dia "akan cukup berhati berani untuk menangkap para jenderal" yang tidak loyal kepada Presiden dan menentang kebijakan-kebijakannya. Untung menjawab bahwa ia akan melakukan hal itu "apabila diperintahkan." Setelah itu Presiden memerintahkannya untuk menyiapkan segala sesuatu hal yang diperlukan "untuk menindak para jenderal itu." (Hal. 87)

Kedua, Seminggu kemudian, Marsekal Chen Yi hadir di Jakarta sebagai utusan Peking dalam ikut serta merayakan Hari kemerdekaan 17 Agustus 1965. Menyatakan kepada Dr. Subandrio tentang "tempat tinggal yang nyaman untuk Presiden Sukarno di Danau Angsa, Cina." Skenario yang

kelak diterapkan dengan berhasil kepada Norodom Sihanouk ketika mengkomuniskan Kamboja di bawah kepemimpinan Polpot.

Ketiga, Rapat Kedua Politbiro PKI di Jakarta pada 26 Agustus 1965 dimana rapat tersebut membahas perlunya Presiden membentuk Kabinet Gotong Royong setelah dipenggalnya komando puncak AD. Rapat selanjutnya membahas kompoisisi keanggotaan pemerintahan yang baru yang sangat didominasi oleh kekuatan revolusioner. Politbiro mempercayakan kepada Aidit untuk menyampaikan susunan itu kepada Presiden untuk mendapat persetujuan. Dan presiden menyetujui usulan tersebut, sebagaimana Aidit melaporkan. (Hal. 89)

Kini, dengan tidak prospektifnya sebuah revolusi agraria maka sejak 8 Agustus 1965 Aldit telah memiliki cetak biru untuk jalan pintas merebut kekuasaan. Pertama, Memenggal puncak komando AD atas perintah presiden; kedua, Pemerintahan baru oleh Kabinet Gotong Royong yang langsung ditunjuk Presiden yang akan menempatkan Indonesia di bawah kekuasaan PKI; Ketiga setelah Presiden memayungi transisi ini dengan legitimasi dan kewibawaannya secara terhormat, maka ia langsung mengundurkan diri ke suatu tempat peristiaratan di Cina dengan alasan kesehatan. Sebuah skenario yang canggih nan licik.

4

SUKARNO DAN ANGKATAN DARAT BERSEBERANGAN 1965

Pada bab ini Victor M. Fic mencoba menganalisis kritisnya hubungan antara Presiden Sukarno dengan Angkatan Darat. Fic menyebut perbedaan antara keduanya semakin terbuka sejak digelarnya Seminar yang digelar para Jenderal terkemuka di Gedung Seskoad-Bandung pada 1-5 April 1965. Salah satu makalah yang mengemuka ialah perlunya memperhatikan Bahaya dari Utara yakni ancaman ekspansi komunisme Cina melalui konflik bersenjata di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Berdasarkan hal ini, maka kekosongan strategis karena menurunnya kehadiran militer Inggris-Amerika di kawasan yang mengelilingi Indonesia harus diisi oleh Indonesia sendiri dan bukan oleh kebijakan ekspansionis Cina dan negara-negara sekutunya. Makalah tersebut jelas menantang visi strategis Presiden Sukarno yang memandang bahwa pertikaian itu adalah konfrontasi antara Kekuatan Baru dan Kekuatan Lama. Pada hari kedua seminar itu, tanggal 2 April 1965, Presiden memanggil semua peserta seminar ke Istana Bogor dan menyangkal kecenderungan itu. Mesti ia memuji Jendral A. Yani tentang hal itu, namun tak pelak Presiden Sukarno memberi teguran kepadanya dan para peserta.

Meski mendapat teguran Presiden, para peserta bersikukuh dengan pendiriannya, dan menerbitkannya sebagai dokumen yang diberi judul

Tri Ubaya Cakti, dicetak dan disebarluaskan di kalangan perwira AD. Jelas Presiden sangat kecewa. Dalam perbincangan usai peringatan ulang tahunnya 6 Juni 1965 dengan sejumlah tokoh seperti Dr. Subandrio, Chairul Saleh, Dr. J. Leimena, Jusuf Muda Dalam, Brigjen Sjafiuddin, Gubernur Bali dan lainnya presiden menyatakan bahwa beberapa jenderal di kalangan AD tidak loyal kepadanya. Mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang tahap perkembangan revolusioner dewasa ini. Konsep Bahaya dari Utara jelas konsepsi yang salah dan berbahaya, terutama karena menentang Poros Jakarta-Peking. Presiden pun memerintahkan Brigjen Sjafiuddin untuk menyelidiki siapa saja jenderal-jenderal yang tidak loyal itu.

Pembalasan Presiden cepat sekali dan menentukan, demikian tulis Fic. Setelah pesta ulang tahun itu, Presiden melakukan kampanye pembunuhan karakter dalam bentuk sindiran, desan-desus hingga fitnah terhadap para jenderal AD yang berdiri di belakang doktrin itu. Mereka juga dicemooh secara terbuka dan diadu dengan angkatan-angkatan lainnya. Dalam situasi itulah muncul isu Dokumen Gilchrist dan Dewan Jenderal, membuat para Jenderal AD semakin tersudutkan.

Keinginan menghabisi para jendral yang tidak loyal ternyata terus mendominasi pikiran Presiden. Pada tanggal 15 September 1965 kira-kira pukul 08.00 di Istana Merdeka, Presiden memerintahkan Brigjen Sabur dan Brigjen Sunarjo untuk melakukan aksi terhadap para jenderal itu, disaksikan oleh sejumlah pejabat yakni Subandrio, Brigjen Sudarhio, Brigjen Polisi Sutarto, Mualif Nasution Djamin, dan Hardjo Wardjo. Perintah itu diulanginya lagi pada 23 September 1965 Pk. 07.00 di Istana Merdeka, Jakarta ketika Jenderal Mursyid melaporkan ketidakloyalan komando puncak AD. Presiden Sukarno berpaling kepada Brigjen Sabur untuk menegaskan kembali perintahnya terdahulu dan memerintahkan

Brigjen Sudiro, Komandan Polisi Militer, yang juga hadir, untuk membantu Sabur dalam tugas ini.

Tekad Presiden untuk membersihkan para jenderal yang tidak loyal terus menerus dibincangkan dalam berbagai kesempatan, utamanya dengan para ajudannya. Termasuk perbincangannya dengan Brigjen H. Sugandhi di kamar tidur Presiden tanggal 30 September 1965 pagi hari. Dalam perbincangan tersebut, Sugandhi mengaku terus membandel dengan mengatakan bahwa dewan jenderal itu tidak ada bahwa Yani itu sangat setia kepada presiden. Hingga akhirnya Presiden gusar dan berkata " Sudah, jangan banyak bicara, jangan ikut-ikut. Kamu tahu dalam Revolusi menurut Thomas Carlyle, seorang bapak dapat memakan anaknya sendiri."

Sore hari setelah perbincangan dengan Brigjen Sugandhi, 30 September 1965, dengan dikawal Untung Presiden pergi ke Stadion Olahraga Senayan untuk berpidato di hadapan ribuan peserta Mubes Teknik. Saat Presiden duduk di atas panggung bersama para tetamu, Untung menerima sepucuk surat dari Sogol alias Nitri seorang Anggota Penjaga Keamanan Presiden. Surat dimohonkan untuk segera disampaikan kepada Presiden. Surat diterima oleh Presiden melalui Ajudan Kolonel Bambang Widjanarko. Presiden bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke toilet, diiringi Kolonel Saelan dan Kolonel Widjanarko, kemudian pergi keluar beranda untuk membaca surat itu. Beberapa kali mengangguk dan setelah itu memasukkan surat itu kedalam saku jasnya. Menurut Widjanarko, surat itu melaporkan bahwa semua persiapan untuk menghabisi para jenderal telah dilaksanakan dengan sempurna, bahwa operasi itu akan dimulai pada pukul 04.00 subuh keesokan harinya. Surat itu juga memberi tahu presiden bahwa setelah ini, sebuah delegasi yang terdiri dari para perwira yang loyal akan datang ke Istana Merdeka untuk

menjaganya terhadap kemungkinan tindakan balasan dan membawanya ke Pangkalan Udara Halim demi keamanannya.

Presiden bangkit dan berdiri di atas mimbar, pidatonya yang ditunggu-tunggu disiarkan luas oleh Radio Republik Indonesia (RRI). Widjanarko memberikan kesaksian: "pidatonya sangat bersemangat, baik tentang isinya maupun cara penyampaiannya." dimana Presiden menuturkan sebuah adegan dari Mahabharata, ketika Krishna menasihati Arjuna yang tengah ragu untuk pergi berperang. Bawa seorang ksatria harus melakukan tugasnya terlepas dari akibat apapun yang akan menimpa. Dengan menjelaskan makna dari kisah ini Presiden memberi isyarat melalui radio kepada Untung dan para perwira progresif revolusioner lain di berbagai penjuru negeri yang sedang bersiap-siap untuk membunuh saudara-saudara para perwira atasan mereka sendiri, untuk maju terus, karena "perjuanganmu adalah benar, saya bersamamu, kemenangan adalah milikmu." (Hal. 112)

Audit yang hadir di stadion itu memahami betul pesan tersebut. Ia bangkit dari tempat duduknya dan langsung berangkat ke rumah Sjam untuk bergerak melakukan langkah-langkah yang telah direncanakan. Sementara itu, senja sudah turun di atas Stadion, Presiden mengundang Waperdam II Dr. J. Leimena ke atas mimbar untuk mendendangkan sebuah lagu cinta dari Maluku, yang menyebabkan para hadirin meninggalkan stadion itu dengan perasaan gembira yang luar biasa.

5

POLITBIRO DAN RENCANA BESARNYA

Pada bab 5 dan 6 buku ini Fic mencoba merekonstruksi apa yang terjadi di lingkungan PKI menjelang Gestapu. Rekonstruksi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan menetapkan sebuah caveat (peringatan) bahwa pemaparan diskusi-diskusi itu tetap bersifat tentatif dan proporsional (sementara) sampai ditemukan bukti-bukti lebih lanjut yang lebih lengkap.

Menurutnya ada tiga rapat Politbiro yang dilangsungkan di markas besar PKI di Jalan Kramat Raya No. 81 Jakarta. Pertama, 9 Agustus 1965 segera sehari setelah Aidit bertemu Presiden Sukarno. Rapat itu dihadiri oleh tujuh anggota tetap Politbiro yakni Aidit, Lukman, Sudisman, Sakirman, Anwar Sanusi, Njoto, dan Njono. Sedangkan anggota tetap ke delapan, Adjitorop, tidak hadir karena masih di Cina. Dalam rapat itu Aidit melaporkan hasil kunjungannya ke luar negeri serta pembicarannya dengan Presiden Sukarno. termasuk gambaran rencana jahat AD lewat Dewan Jenderal-nya. Politbiro pun mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil PKI untuk menangkal usaha AD tersebut.

Rapat kedua dan ketiga dilangsungkan pada 26 dan 28 Agustus 1965 yang merupakan pembahasan lebih lanjut apa yang dicapai pada rapat pertama. Dalam ketiga rapat itu, Politbiro mengembangkan sebuah

rencana besar berupa jalan pintas untuk meraih kekuasaan yang terdiri dari unsur-unsur berikut: 1) partai akan mengorganisir suatu pukulan preemptive terhadap para jenderal yang tidak loyal untuk mendorong negeri ini memasuki tahap revolusi sosialis; 2) Serangan itu akan diperintahkan oleh Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata; 3) perwira-perwira progresif revolucioner dalam Angkatan Bersenjata akan melaksanakan serangan itu sebagai masalah internal Angkatan Darat; 4) Meskipun begitu, Komite Tetap Politbiro akan memfasilitasi dan mengarahkan seluruh operasi melalui anggota-anggota Biro Chusus; 5) menyusul aksi tersebut, Presiden akan menunjuk suatu Kabinet Gotong Royong, yang akan terdiri dari koalisi kekuatan-kekuatan revolucioner yang di bawah kepemimpinan PKI, akan menghentikan tahap Demokrasi Nasional dari revolusi Indonesia dan mengawali transisi menuju sosialisme; 6) langsung sesudah menunjuk kabinet baru itu Presiden akan diistirahatkan ke China, atau kalau tidak mau, disingkirkan paksa. (Hal. 115)

Sebagai langkah pelaksanaan keputusan Politbiro, Aidit ditugasi membentuk "Komando Pembersihan". Pada 12 Agustus 1965 Aidit memanggil Sjam ke rumah kediannya. Mereka berdiskusi tentang pembentukan komando itu. Dalam kesempatan diskusi, Sjam sempat bertanya apa tidak lebih baik jika membiarkan para jenderal itu menyerang lebih dulu, membiarkan mereka membuka kartu terlebih dahulu, dan barulah kemudian melancarkan serangan balasan dengan tindakan berbasis massa luas secara nasional yang akan melibatkan jutaan pengikut partai. Aidit menjawab:"ini adalah masalah internal AD, dan kita harus tetap di balik layar. Andaikata operasi itu melibatkan massa, akan jelas bagi setiap orang bahwa operasi itu telah disiapkan secara nasional oleh kita. Kemduian kita akan diekspos sebagai organisatornya."

Dengan otoritas yang diberikan Aidit maka Sjam membentuk Komando bersama-sama dua pembantunya yakni Pono dan Walujo. Ketiganya menyeleksi dari ratusan nama yang pantas masuk dalam komando tersebut. Mereka akhirnya mendapatkan tiga nama yakni: 1) Kolonel Latief, Komandan Brigade Infanteri I Garnisun Jakarta, seorang penentang para jenderal AD yang secara terbuka mendukung kebijakan PKI dan memimpin perwira radikal di Garnisun Jakarta; 2) Mayor Udara Sujono alias Pak Joyo, Komandan Resimen Keamanan AURI di Pangkalan Udara Halim, yang merupakan pendukung terbuka PKI yang mengijinkan Pemuda Rakyat mendirikan pusat pelatihan di Lubang Buaya, dan 3) Letkol Untung, Komandan Batalyon Pengawal Istana Tjakrabirawa, yang dikenal dekat dengan PKI sejak Pemberontakan Madiun 1948. Usulan ini disampaikan kepada Aidit. Lebih lanjut Aidit meminta Sjam mengajukan nama-nama tambahan. Pono memasukkan nama Major Infanteri Agus Sigit dari Komando Regional Jakarta, dan Kapten Artilleri Wahjudi. Kemudian Sjam memasukkan nama Brigjen Mustafa Sjarif Supardjo mantan Komandan Resimen Divisi Siliwangi yang tengah digeser dari posnya di Jawa Barat ke Kalimantan Barat untuk memimpin group Tempur 4 Kostrad karena terlalu pro-komunis. Kelompok 9 inilah (3 anggota Biro Chusus dan 6 perwira progresif revolusioner) dikukuhkan menjadi komando operasi pembersihan jenderal AD di bawah komando langsung Aidit. (Hal. 121)

6

JADWAL KUDETA: RINCIAN LANGKAH-LANGKAHNYA

Fic menghitung ada sebelas kali rapat dilakukan "Komando Pembersihan" sebelum Gestapu dilancarkan. Rapat-rapat ini dapat diketahui berkat pengakuan Sjam di depan pengadilan militer. Rapat Pertama dilakukan pada 6 September 1965 pukul 20.00 di kediaman Wahyudi jalan Sindanglaya, Jakarta. Ini merupakan rapat perkenalan seluruh anggota yakni Sjam, Pono, Untung, A Latief, Sujono, Agus Sigit, dan Wahjudi, dilanjut dengan penjelasan Sjam tentang maksud dan tujuan tindakan pre-emptive yang hendak dilakukan mereka.

Rapat Kedua berlangsung tanggal 6 September 1965 juga di rumah Wahjudi dan dihadiri oleh Sjam, Pono, Untung, Latief, Sujono, Sigit, dan Wahyudi. Fokus rapat kedua ialah mengevaluasi kekuatan-kekuatan yang bisa digunakan dalam operasi.

Rapat Ketiga dilakukan di rumah Latief di Jalan Tjawang, Jakarta dengan peserta sama dengan rapat sebelumnya. Bahasan kali ini selain mengulas keputusan sebelumnya, juga mengevaluasi pertimbangan kekuatan pasukan-pasukan yang akan berhadapan satu dengan yang lain dalam suatu konfrontasi. Mereka memberi penilaian positif terhadap Pasukan Tjakrabirawa yang akan digerakkan di bawah komando Untung.

Rapat Keempat berlangsung pada 15 September 1965 juga digelar di rumah Latief dan dihadiri orang yang sama, kecuali Sigit yang diragukan partisipasinya. Selain mengkonfirmasi berbagai kesiapan pasukan, Sjam memberitahukan bahwa dua batalyon dari Jawa Tengah dan Jawa Timur tak lama lagi akan tiba di Jakarta untuk ambil bagian dalam perayaan Hari Angkatan Bersenjata. Pasukan itu bisa diandalkan untuk memberikan dukungan bersenjata pada serangan pre-emptive.

Rapat Kelima berlangsung pada 17 September 1965 di rumah Latief. Diskusi masih seputar ketersediaan pasukan yang bisa diandalkan dalam operasi. dilaporkan bahwa kesatuan yang akan berpartisipasi dalam operasi ialah :1)satu kompi di bawah Untung; 2) satu batalyon di bawah Latief; 3) Satu kompi di bawah Wahyudi; 4) Sekitar 800 sampai 1000 sukarelawan yang tengah dilatih di Pondok Gede di bawah Sujono; 5) Batalyon 454 Dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah; 6) Batalyon 530 dari Divisi Brawidjaja, Jawa Timur. Selain itu, Untung bersikeras agar bisa mendapatkan sebuah kesatuan kavaleri yang terdiri atas 30 tank dan kendaraan lapis baja disiapkan dari Divisi Siliwangi, Bandung.

Rapat Keenam berlangsung pada 19 September 1965 di rumah Sjam jalan Salemba Tengah, Jakarta, dan dihadiri oleh semua anggota, kecuali Sigit yang dilaporkan sedang sakit. Rapat selain membahas masalah logistik, juga membahas persiapan kedatangan Batalyon 454 dan 530. Serta menyepakati pembagian tanggung jawab terkait operasi pre-emptive untuk menculik para jenderal.

Rapat Ketujuh berlangsung pada 22 September 1965 pukul. 20.00 dilakukan di rumah Sjam dihadiri semua anggota, kecuali Sigit dan Wahyudi. Pada rapat dibagikan sandi-sandi menggunakan istilah Mahabarata bagi masing-masing gugus tugas. Pasopati untuk pasukan

pemukul dipimpin Letnan infanteri Dul Arief, di bawah komando Latief. Bhimasakti untuk pasukan teritorial akan dipimpin oleh Kapten Infanteri Suradi, dibawah komando Latief. Gatotkaca untuk pasukan cadangan dimimpin Mayor Udara Gathut Sukrisno, meliputi sukarelawan yang dilatih di Pondok Gede oleh Sujono. Rapat juga membagi Jakarta menjadi enam sektor militer yakni utara, tengah, selatan, timur, barat, dan Tanjung Priok.

Rapat Kedelapan berlangsung pada 24 September 1965 Pukul 20.00 dilaksanakan di rumah Sjam dihadiri anggota yang sama pada rapat yang terakhir. Rapat membahas kehandalan pasukan sukarelawan yang dilatih Sujono di Pondok Gede dan menyetujui penggunaan mereka dalam operasi. Selain itu, Sujono diberi tugas untuk menemukan tempat yang sesuai bagi Central Komando (CENKO) bagi operasi ini. CENKO akan mengarahkan tahap awal serangan dan hendaknya ditempatkan tidak jauh dari Pangkalan Udara Halim yang dijadikan pusat dari seluruh operasi. Sjam juga menjelaskan perlunya dibentuk Dewan Revolusi segera setelah operasi berhasil dilakukan, serta memberitahu bahwa Untung dan para kolega militernya akan menjadi anggota Presidium Dewan Revolusi.

Rapat Kesembilan berlangsung pada 26 September 1965 pada pukul 21.00 masih di rumah Sjam, dihadiri oleh anggota yang sama dari rapat sebelumnya. Sjam mengusulkan agar Halim dijadikan pangkalan, dari situ keseluruhan operasi akan diarahakan. Halim juga cukup dekat dengan Pondok Gede tempat ribuan sukarelawan sedang berlatih. Rapat juga menyetujui Pusat Survei Udara PENAS yang berada di luar pintu masuk Halim menjadi CENKO I dimana penculikan Jenderal akan digerakkan, setelah itu dialihkan ke CENKO II yang berlokasi di rumah Sersan AURI Anis Sujatno di komplek Perumahan Bintara di dalam wilayah hunian Pangkalan Udara Halim. Di CENKO II inilah menjadi markas besar bagi

Komando Pembersihan dalam melakukan aksi-aksinya. Dibahas pula kekhawatiran dengan berdatangannya puluhan ribu pasukan yang akan mengikuti peringatan Hari Angkatan Bersenjata dan mendesak agar operasi dilakukan sebelum jumlah pasukan itu mencapai puncaknya. peserta menyetujui D-Day nya tanggal 29 September, namun Untung bersikeras baru diputuskan jika sudah mendapat kepastian bergabungnya pasukan Kavaleri dari Bandung.

Rapat Kesepuluh berlangsung pada 29 September 1965 pukul 21.00 juga di rumah Sjam. Rapat dihadiri orang-orang yang sama, ditambah Brigjen Supardjo yang dipanggil Sjam dari Kalimantan sehari sebelumnya. Supardjo dikenalkan oleh Sjam sebagai jenderal bintang satu yang ikut serta dalam operasi dan memimpin sebuah delegasi dari keempat angkatan ke Istana menemui presiden untuk memberitahu presiden bahwa dirinya dalam bahaya karena rencana kudeta Dewan Jenderal, dan bahwa demi keamanan Presiden harus pergi ke Pangkalan Udara Halim di bawah pengawalan Supardjo. Jika presiden menolak, Supardjo akan membawanya secara paksa. Rapat membahas target jenderal-jenderal yang akan dihabisi. Sjam mengusulkan delapan jenderal akan dijadikan target gugus tugas Pasopati : 1) Jenderal AH Nasution, Menko Hankam/KASAB; 2) Letjen Achmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat; 3) Mayjen Suwondo Parman, Kepala Intelijen AD; 4) Mayjen Suprapto; 5) Mayjen M.T. Harjono; 6) Brigjen D.I. Pandjaitan; 7) Brigjen Sutoyo Siswomihardjo; dan 8) Brigjen Achmad Sukendro. Menurut laporan, nama para Jenderal itu telah diberikan Aidit kepada Sjam sejak tanggal 20 September dengan instruksi setelah diambil dari rumah masing-masing agar dibawa ke Halim. Dalam rapat malam itu Sjam sempat mengusulkan pada Aidit agar Mohammad Hatta, Chairul Saleh, dan Sukarni juga turut diambil untuk membangun kesan hubungan politis lebih luas dengan para jenderal, tetapi Untung menolak.

Rapat menyepakati bahwa sandi operasi adalah TAKARI. Selain membahas lebih detil kesiapan pasukan juga ditetapkan D-Day dan H-Hour operasi. Atas saran Sjam jadwal ditunda dari 30 September 1965 menjadi 1 Oktober 1965 dinihari. H-Hour ditetapkan pukul 04.00 tetapi operasinya tetap dinamakan Gerakan 30 September (GESTAPU). Sebelum bubar rapat menyepakati keesokan harinya, 30 September, semua anggota kelompok harus bertemu di Lubang Buaya pada pukul 10 pagi untuk briefing dan koordinasi lanjutan.

Sepanjang hari itu semua anggota Komando sibuk dengan serangkaian persiapan, dan malam harinya digelar rapat kesebelas di rumah Sjam. Untuk pertama kalinya Aidit sebagai Panglima Komando seluruh operasi itu muncul dalam rapat didampingi Kusno sekretarisnya dan Walujo anggota Biro Chusus. Aidit datang langsung dari Senayan setelah mendengarkan sendiri isyarat rahasia dari Presiden lewat pidatonya tentang dharma (tugas mulia) dari petikan Mahabharata. Malam itu Aidit juga mengundang Mayjen Pranoto Reksosamudro yang dalam pertemuan berdua di salah satu kamar menawarkan jabatan Men/Pangad menggantikan Yani. Akan halnya jabatan Menko Hankam/KASAB diproyeksikan untuk Untung yang masih berpangkat Letnan Kolonel. Untuk itu, Aidit membuat Keputusan No.2 Dewan Revolusi yang menurunkan semua pangkat perwira yang lebih tinggi di seluruh Indonesia menjadi Letnan Kolonel yang akan disiarkan secara luas pada 1 Oktober 1965.

Pada bab ini Fic juga mengungkap Aidit kini memiliki tiga opsi bagaimana Presiden Sukarno lengser dari kursi kepresidenannya. Pertama, Ini jalan paling disukai, adalah jalan terus bersama Presiden sampai tuntas; membersihkan para jenderal, memaksa Presiden mendukung pembentukan Dewan Revolusi dan menyepakati keanggotaannya,

memaksa Presiden membentuk Kabinet Gotong Royong dan kemudian mengundurkan diri dari kehidupan publik karena alasan kesehatan ke Cina, dengan penuh kemuliaan sebagai Presiden Kehormatan Seumur Hidup, atau gelar lain yang hebat-hebat. Opsi Kedua, jika Presiden menolak untuk mendukung Dewan Revolusi maka jalan tanpa Presiden dengan cara menggusur Presiden entah dengan cara baik-baik atau dengan paksa. Opsi ketiga, ini yang paling tidak disukai, kemungkinan jalan terus tanpa Presiden dari awal sampai akhir, maka pembersihan dilakukan tanpa Presiden, diikuti pembentukan Dewan Revolusi dengan penunjukan Kabinet Gotong Royong untuk secepatnya memulai transisi langsung menuju Demokrasi Rakyat, dan Presiden akan dilenyapkan dalam pergolakan itu. Mana opsi yang akan dilaksanakan sangat bergantung pada pasang naik dan surutnya situasi revolusioner pada 1 Oktober 1965. (Hal. 151)

Bahasan lain yang dimuat pada bab ini adalah langkah yang dilakukan oleh Omar Dhani untuk mempersenjatai Pasukan Penculik pada malam 30 September 1965. Fic mengungkapkan bahwa senjata yang diperoleh Dhani dari Cina belum dibongkar pada waktunya, sehingga sampai malam akan dilakukan operasi Komando pembersihan belum mendapatkan senjata yang dibutuhkan. Malam itu juga Omar Dhani mengatur usaha memasok Komando Pembersihan itu dengan senjata-senjata dan kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan dari gudang senjata AURI. (Hal. 155)

Lebih rinci Fic mengurai latar penyebab keputusan Omar Dhani tersebut, dengan mengungkap terlebih dahulu masuknya informasi tentang 1 Oktober sebagai D-Day pelaksanaan Gestapo kepada Omar Dhani. Informasi itu dipasok dari Waluyo melalui Letkol Udara Heru Atmodjo yang bertindak sebagai penghubung antara Biro Chusus dengan

Marsekal Madya Udara Omar Dhani. Informasi tersebut sesuai dengan yang diperoleh Dhani dari Supardjo secara personal sehari sebelumnya. Omar Dhani segera menggelar rapat di rumahnya pada 30 September 1965 malam hari, yang dihadiri oleh Marsekal Madya Udara Maki, Komodor Dewanto, Komodor Udara Handoko, Letnan Kolonel Udara Heru Atmodjo, dan Komodor Leo Wattimena. Heru melaporkan tentang persiapan Operasi Takari, penempatan pasukan pemukul dan detil terkait penahanan dan eksekusi jenderal-jenderal AD. Rapat juga mendiskusikan permintaan Sujono agar AURI menyediakan senjata bagi keperluan Supardjo dan kawan-kawan. Sujono menyatakan jika tidak dipenuhi akan membawa paksa dari Depot Mampang. Rapat memutuskan untuk memenuhi permintaan Sujono dengan memerintahkan pool kendaraan untuk menyediakan 17 kendaraan. Pihak AURI juga mengijinkan pasukan pemberontak yang datang ke Depok Mampang untuk mengeluarkan 3000 pucuk senapan, senjata laras pendek dan amunisi. Beberapa senjata itu dibawa Dhani dari Cina dengan pesawat Hercules pada akhir September dan disimpan di sana.

7

JENDERAL SUHARTO: KUDA HITAM 1965

Pada bab ini Fic secara khusus mengulas keberadaan dan peran Jenderal Suharto. Fic menjulukinya si Kuda Hitam. Bagi Fic, Suharto dan Kostrad merupakan faktor X dari sebuah persamaan. Faktor X yang dimaksud ialah sikap yang akan diambil oleh Suharto sebagai komandan Kostrad terkait pembersihan para atasannya dan koleganya, serta sumber-sumber daya penting lainnya di seantero negeri.

Untuk memastikannya, demikian Fic menulis, ternyata merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi PKI. Selain karena Suharto dikenal sebagai pendukung Presiden yang sangat loyal dan bahkan paling penuh pengabdian, dihormati oleh sesama perwira dan semua orang yang menjadi bawahannya karena dia berpribadi yang baik hati dan ramah, serta dianggap sebagai "pengayom" orang biasa terhadap perlakuan tegas tanpa kompromi birokrasi militer. Semua tokoh konspirator yang berlatar militer memiliki hubungan pribadi yang hangat dan dekat dengan dia dan keluarganya: beberapa diantaranya selalu terkenang pada masa muda ketika sama-sama bertugas di Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Meski bukan simpatisan PKI, secara pribadi Suharto kenal dekat dengan para pemimpin G30S sejak dia melakukan negosiasi dengan Muso, Wikana, dan lainnya dalam rangka menumpas Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 atas nama pemerintahan Presiden Sukarno. (Hal. 158)

Sjam paling lama mengenal Suharto, tepatnya sejak tahun 1950-an. Saat itu Sjam adalah anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan "berada dalam pengaruh" paman Sutan Sjahrir yakni Djohan Sjahroezah. Dan Sekitar periode yang sama dia berhubungan dengan Letkol Suharto dan sering menginap dirumahnya di Yogyakarta. Sedangkan Kolonel Latief sudah mengenal Suharto sejak ia berada di Jawa Tengah dan kemudian menjadi staf intelijen Suharto selama operasi pembebasan Irian Barat. Mereka menjadi sahabat dekat, begitu pula isteri-isteri mereka, dan saling mengunjungi dan saling nengikuti acara-acara keluarga masing-masing pihak dan saling memberi hadiah. Demikian pula Untung, mengenal Suharto sejak operasi pembebasan Irian Barat, dimana Untung mendapat medali militer atas keberaniannya dalam operasi saat menjadi anak buah jenderal itu. Pada Februari 1965 Untung dipindah dari Divisi Diponegoro ke Jakarta untuk memimpin batalyon Pengawal presiden atas rekomendasi Suharto. Kedekatan keduanya mendapat bukti paling akurat dari fakta bahwa pada akhir bulan April 1964 "Suharto pergi meninggalkan Jakarta menuju Kebumen di Jawa Tengah untuk menghadiri resepsi pernikahan Untung." Dan akhirnya bahkan Supardjo pun kenal baik dengan Suharto karena dia menjadi bawahannya selama konfrontasi dengan Malaysia. Suharto mengunjungi yang bersangkutan di markas besarnya di Pontianak, Kalimantan Barat menjelang tanggal 17 Agustus 1965 untuk mengkoordinasikan aksi militer melawan Malaysia di Sarawak. (Hal. 158)

Rapat Komando Pembersihan mengutus Latief untuk mengunjungi Suharto di rumahnya guna memastikan keikutsertaannya. Berdasarkan pengakuan Latief kemudian, dia dan keluarganya mengunjungi Suharto di rumahnya di jalan Agus Salim dua hari sebelum (29 September 1965) kejadian tanggal 1 Oktober. Kesaksian Latief :" Selain berbincang-bincang mengenai masalah keluarga, saya juga bermaksud menanyai

beberapa hal menyangkut informasi yang telah saya terima tentang Dewan Jenderal, dan sekaligus melapor padanya "segala yang telah saya ketahui". Dia sendiri memberi tahu saya demikian: Sehari sebelumnya dia telah tahu dari bawahannya dari Yogya, namanya Subagyo, bahwa ada informasi tentang Dewan Jenderal dalam AD, yang telah berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Sukarno dan pemerintahannya. Suharto berpendapat bahwa informasi itu harus diselidiki dulu. Namun karena begitu banyak tamu di ruangannya itu maka kami pun beralih ke topik lain yang berkaitan dengan masalah rumah.

Menyadari pentingnya kejelasan sikap Suharto dan Kostrad, sekali lagi Latief diutus menemui Suharto pada keesokan harinya. Latief bergegas menuju rumah Suharto dan diberitahu bahwa Suharto dan Isteri sedang menunggu putra bungsu mereka, Tommy di rumah sakit tentara yang dirawat karena luka bakar akibat tertumpah sop panas pada malam sebelumnya. Latief muncul di ruang perawatan Tommy pada pukul 22.00 menemui Suharto. Suharto sendiri tetap berada di rumah sakit hingga tengah malam, sampai Ibu Tien menyuruh suaminya pulang karena putri mereka yang baru berusia satu tahun ditinggal sendirian ditemani dengan seorang pembantu. Hanya secuil informasi yang diperoleh terkait malam itu. Wawancara Suharto dengan Arnold Brackman beberapa saat setelah gagalnya Gestapu hanya mengungkap bahwa Latief mengunjunginya ke rumah sakit untuk mencari tahu tentang dirinya, artinya Latief merasa perlu mengamati apakah Suharto menunjukkan tanda-tanda yang bisa menjadi indikasi kesiapannya untuk mengambil suatu tindakan guna menggagalkan kudeta G30S itu, atau apakah perhatiannya yang tercurah habis pada anak bungsunya membuat Suharto tidak punya waktu untuk melakukan hal tersebut.

Pada wawancara yang dilakukan oleh des Spiegel pada Juni 1970 Suharto ditanya mengapa namanya tidak tercantum dalam daftar nama jenderal yang akan diculik, Suharto mengatakan bahwa Latief datang ke rumah sakit untuk membunuhnya, namun urung melakukannya karena melihat banyak orang yang hadir di situ. Sedangkan wawancara dengan Latief yang dilakukan pada 24 Mei 1998 menyatakan bahwa dirinya telah tiga kali bertemu dengan Suharto untuk membicarakan hal itu pada September 1965, namun hanya pada pertemuan terakhir itulah keadaan memungkinkan untuk mengatakan kepada Suharto apa yang akan terjadi keseokan pagi harinya. Meski demikian, tak banyak informasi yang diperoleh dari detil perbincangan itu.

Fic berasumsi bahwa pertemuan itu digunakan Latief untuk menjelaskan "versi ringkas" dari rencana Gestapu dan berharap mendapat dukungan Suharto. Sementara sikap diamnya Suharto diasumsikan Fic dimaksudkan mengulur-ulur waktu untuk mencari tahu bagaimana perkembangan berbagai hal pada besok pagi, untuk melihat sendiri bagaimana sikap Presiden nanti dan kemana arah yang akan diambil Presiden. Sesudah itu barulah Suharto bisa memutuskan tindakan apa yang harus diambil.

8

PRESIDEN MELOLOSKAN DIRI DARI PERANGKAP AIDIT

Latief datang terlambat ke pertemuan di Halim. Ia melaporkan sikap yang mendua dari Panglima Kostrad Mayjen Suharto dengan menyimpulkan bahwa sang Jenderal tidak akan mendukung maupun menentang operasi itu. Mendengar itu, Sjam memutuskan bahwa aksi harus tetap dilaksanakan tanpa mempedulikan sikap Suharto, dan menyuruh Untung untuk mengontak para komandan Batalyon 454 dan 530 untuk memerintahkan mereka mengawasi istana Presiden, stasiun radio, pusat telekomunikasi dan instalasi lain seantero kota. Sementara Aidit meninggalkan rumah Sjam menuju Halim pada pukul 23.00 ditemani Pranoto dan Omar Dhani tiba di Halim setelah tengah malam ditemani oleh dokter pribadinya, menginap di Pusat Komando Pangkalan AURI.

Begitu persiapan di Pondok Gede selesai maka para perancang menuju CENKO I di Gedung PENAS dan tiba di lokasi pada pukul 2 dini hari. Sementara itu Latief tetap berada di Pondok Gede mengatur pengiriman pasukan pelaksana penculikan para jenderal, Dhani menginap di Halim menunggu kedatangan Presiden keesokan harinya, Aidit tetap berada di Pos komandonya di rumah Suwardi bersiap untuk melangsungkan tahapan politik operasi itu begitu para jenderal berhasil diamankan.

Kira-kira pukul 1.30 dinihari tanggal 1 Oktober 1965, tujuh skuadron tentara yang ditugaskan menculik para jenderal meninggalkan Pondok

Gede, mereka menyambangi rumah-rumah orang yang telah ditandai. Pukul 3.30 pengepungan selesai dan korban pertama, Jenderal MT Harjono, terbunuh karena melawan. Peristiwa itu kemudian berubah menjadi sukses yang cepat: pada pukul 4.00 pagi batalyon 454 dan 530 mengepung istana dan mengendalikan stasiun radio dan pusat komunikasi di Lapangan Merdeka; pukul 4.00 dilakukan upaya penculikan terhadap Jenderal Nasution, namun lolos dengan luka di kaki sementara puterinya terluka parah; pada pukul 4.30 Jenderal Yani terbunuh di rumahnya; pukul 4.50 Jenderal Panjaitan terbunuh pula, pukul 5.00 Jenderal Parman, Suprapto, dan Sutojo bisa dibawa hidup-hidup.

Berita bahwa para Jenderal telah berhasil diculik diterima dengan rasa lega luar biasa di CENKO I, dimana mereka yang hadir saling berpelukan karena sukses salah satu tahap dari operasi mereka. Sementara laporan lolosnya Nasution membuat Aidit dan koleganya sangat terkejut, masalah besar akan menghadang. Tak lama setelah itu sebuah pertanyaan datang dari Pondok Gede menyangkut apa yang mesti dilakukan dengan para jenderal yang masih hidup. Sjam mendiktekan pesan kepada Sujono yang menyatakan bahwa mereka harus dibunuh, meskipun hal ini bertentangan dengan rencana asli yang mempertimbangkan pentingnya pengakuan mereka untuk disampaikan kepada Presiden maupun Pengadilan Rakyat. Dengan instruksi tertulis di tangan, Sujono bergegas ke Pondok Gede dimana Gerwani telah diberi kewenangan menyiksa dan membunuh para jenderal yang masih hidup, melempar tubuh mereka ke dalam sumur terdekat, yang dikenal dengan nama Lubang Buaya.

Pukul 5.30 pagi 1 Oktober 1965 fase militer Operasi Takari diakhiri, meski tidak terlalu sukses karena Jenderal Nasution lolos dan masih hidup. Kini para perancang beralih melaksanakan tahap kedua dari rencana mereka, dengan Presiden Sukarno sebagai pemain sentralnya.

Segera setelah laporan tentang likuidasi para jenderal diterima, pukul 5.00 pagi Untung mengirim Brigjen Supardjo sebagai ketua delegasi empat angkatan pergi ke Istana Merdeka. Sesuai skenario, Supardjo akan memberitahu Presiden bahwa dewan jenderal merencanakan sebuah kudeta, bahwa saat itu tindakan untuk menangkalnya telah diorganisir oleh Untung dan para perwira yang loyal terhadap Presiden, dan bahwa delegasi sudah datang untuk mengawalnya ke rumah Susanto di Halim untuk melindunginya dari tindakan pembalasan yang mungkin akan dilakukan oleh musuh. Ketika Supardjo bertanya apa yang harus dilakukan jika Presiden menolak ikut, Untung menjawab bahwa dia harus membawanya pergi yang berarti membawanya dengan paksa. Karena jika Presiden tidak sampai berada di rumah Susanto dan tidak di bawah kendali Untung dan Aidit berarti operasi gagal.

Betapa terkejutnya Supardjo dan timnya ketika mendapati Presiden tidak ada di Istana Merdeka dan tidak diketahui keberadaannya. Heru Atmodjo membawa kelompok itu ke Halim dengan helikopter pada pukul 07.00 pagi. Supardjo segera melaporkan hal itu kepada Omar Dhani di Pusat Pangkalan Komando Operasi di pangkalan udara. Dhani sesungguhnya sudah mengetahui terlebih dahulu tentang semua hal itu, karena Dhani sendiri telah berbicara dengan Presiden melalui telepon segala detilnya dan mendesak Presiden segera pergi ke Halim. Meski begitu Dhani mengucapkan selamat kepada Supardjo atas keberhasilan Operasi Takari namun juga menyesalkan lolosnya Nasution dan berkata: "bagaimana kita bisa luput menangkap Nasution padahal satu divisi Ampera telah digerakkan?"

Supardjo kembali ke Cenko I sekitar pk.09.00 pagi, dan bertukar pendapat dengan Untung, Sjam, dan pentolan lainnya mengenai keberadaan Presiden. Saat itu juga mereka menerima informasi bahwa

Presiden baru saja tiba di Halim. Supardjo mencoba mengulang misinya, bergegas ke Halim dan tiba di Pusat Komando Halim pada pk.10.00 pagi. Kehadiran Presiden di Halim menjadi penanda berakhirnya fase militer dan dimulainya fase politik dimana para perencana kudeta meninggalkan CENKO I dan membuka CENKO II di rumah Anis Sujatno yang berada dalam kawasan hunian pangkalan udara Halim. Supardjo bersiap menjalankan misinya dengan membawa daftar nama anggota Dewan Revolusi yang dibuat Aidit dan diperolehnya dari Sjam pada malam sebelumnya. Aidit berharap skenario pertama dari tiga skenario yang dimilikinya dapat direalisasikan dalam negosiasi itu.

Sebelum membahas proses politik yang berlangsung antara Supardjo dan Presiden, terlebih dahulu Fic merekonstruksi ketidakberhasilan Supardjo menemui Presiden di Istana. Usai berpidato dengan penuh semangat di Senayan malam itu, Sukarno meluncur ke Istana dan tiba pukul 23.30 . Tak lama kemudian la pergi meninggalkan istana lagi, menjemput Dewi di Hotel Indonesia dan masuk ke rumahnya di Wisma Yaso. Sekitar pukul 5 pagi diberi tahu Komisaris Polisi Sunarjo yang mendampinginya bahwa dirinya baru menerima telepon yang memberitahukan bahwa istana dikepung pasukan tak dikenal. Tak berselang lama, telepon datang dari kediaman Waperdam II, Dr. Johannes Leimena, yang melaporkan ada usaha menangkap Jenderal Nasution dan bahwa dia terluka namun berhasil melarikan diri.

Dalam keadaan seperti itu Presiden mengurungkan niatnya pergi ke Istana dan memerintahkan sopirnya untuk membawanya ke rumah isterinya yang lain Haryati di Grogol. Selain itu, Presiden meminta Letkol Ali Ebram pergi ke rumah Haryati lalu mengutusnya ke rumah Nasution untuk mencari jenderal itu dan membunuhnya. Sementara Latief menyisir beberapa rumah sakit di Jakarta untuk mencari Nasution untuk tujuan

yang sama. Presiden sarapan pagi di sana dan pada pukul 7.20 pagi ia mendengarkan siaran radio Komunike tentang gerakan 30 September yang ditandatangani Untung sebagai pemimpinnya.

Fic membuat analisis bahwa kecil kemungkinan Presiden terkejut dengan siaran Komunike tersebut, karena dia telah menjalin "hubungan yang sangat dekat" dengan para pemimpin Gestapu, sementara ia sendiri telah secara eksplisit memerintahkan beberapa dari merak dan menunjukkan persetujuannya secara langsung maupun tersirat kepada yang lain (Hal. 172)

Demi mendengar komunike itu, Presiden mulai menyadari bahwa setelah menghancurkan puncak komando AD akhirnya dia mendapati kini tak ada lagi yang bisa melindunginya dari ancaman Aidit dan Untung, dan terbukalah kemungkinan ancaman politik dan pemaksaan, termasuk bahaya fisik terhadap dirinya. Di atas semua itu, lolosnya Nasution yang kini teraniaya dan terluka hatinya, bisa membuat Presiden berhadapan dengan masalah besar. Semua itu merupakan pengalaman yang sangat baru bagi Presiden, penuh dengan resiko tak terduga, yang mungkin mempengaruhi segala perilakunya sepanjang hari itu, termasuk mengubah komitmennya dengan Mao dan Aidit.

Hal kedua dari Komunike yang membuatnya tertekan dan gelisah yakni kenyataan bahwa dia tidak akan memegang peran apa pun di dalamnya. Rupanya Skenario yang dipilih Aidit dalam komunike itu adalah jalan terus tanpa melibatkan Sukarno. Dan Presiden yang mendengar Komunike itu mendapati nama Presiden tidak disebut-sebut sama sekali dalam susunan Dewan Revolusi. Kecurigaan Presiden terbukti dalam diskusinya dengan para ajudan mengenai serangkaian tindakan yang harus diambilnya. Mereka mengusulkan agar dia meninggalkan Jakarta

ke suatu tempat yang aman, atau menyelidki dulu dan menunggu hingga laut kembali tenang. Akhirnya Sukarno memutuskan pergi ke Pangkalan Udara Halim, dimana pesawat kepresidenan Jet Star selalu siap sedia membawanya ke tempat yang aman di manapun. Omar Dhani juga telah mengontaknya dan mendesaknya untuk segera datang ke Halim. Dalam konteks inilah pada pukul 7 pagi rombongan Presiden meninggalkan rumah Haryati menuju Halim.

Sebelum Presiden tiba di Halim, Omar Dhani membuat perintah harian yang disiarkan pada pukul 09.00 pagi yang sepenuhnya membenarkan aksi pembersihan itu dan menempatkan AURI sebagai pelaksana gerakan progresif revolusioner itu. Siaran itu menguatkan keyakinan Presiden akan posisi AURI yang berada di pihaknya saat dirinya tiba di Halim antara pukul 09.00- 09.30 pagi.

Menjelang pukul 10.00 pagi Supardjo tiba naik mobil Nissan Patrol didampingi Letkol Udara Heru Atmodjo, Major Infanteri Sukirno, dan Major Infanteri Bambang Supeno. Ketika memasuki gedung itu Supardjo meletakkan pistolnya di meja dan ditunjukkan oleh Omar Dhani ruangan tempat Presiden telah menunggunya. Supardjo memberi salam dan melaporkan apa yang telah diskenariokan bersama komplotannya. Dia juga melaporkan bahwa beberapa jenderal telah diamankan tapi Nasution Lolos yang kemudian dikomentari oleh Presiden: "Biasa dalam sebuah revolusi." dan meminta informasi lebih lanjut mengenai lolosnya Nasution. Presiden juga menekan Supardjo untuk menunjukkan bukti keberadaan Dewan Jenderal, yang tak bisa dijawab dengan sempurna oleh Supardjo. Berikutnya, seperti diungkap oleh Widjanarko, ketika sendirian bersama Presiden, Supardjo menyodorkan daftar anggota Dewan Revolusi yang telah ditandatangani Untung. Presiden melihatnya sekilas dan menjadi sangat marah dan mengatakan bahwa tindakan

Untung sangat NEKOLIM. Presiden menolak daftar itu. Meski demikian, Sukarno tidak memanggil Aidit yang berharap-harap agar dirinya segera dipanggil untuk menuntaskan skenario politik yang telah dirancangnya.

Menyadari Presiden tidak berhasil dipindahkan ke fase kedua operasi itu Supardjo goyah dan mulai memisahkan diri dari Untung. Kepada Presiden akhirnya Supardjo berkata bahwa dia tidak termasuk dalam rencana Untung terutama menyangkut penetapan kelanjutan politik setelah pembersihan dan bahwa keterlibatannya dengan Untung hanya sampai pada menggagalkan niat jahat Dewan Jenderal dan membela Presiden.

Selanjutnya mereka berdua pindah ke ruang utama dimana telah hadir Omar Dhani, Sunarjo, Kolonel Saelan, Komodor Udara Leo Wattimena, Kolonel Suparto. Presiden mendengarkan laporan Sabur tentang peristiwa yang terjadi di Istana Merdeka pada dini hari dan berbagai detil mengerikan tentang penculikan para jenderal. Presiden tampaknya terganggu dengan laporan Sabur dan berpaling kepada Supardjo dan bertanya dalam bahasa Sunda apakah dia bisa menghentikan bukan hanya pertumpahan darah itu tetapi juga seluruh operasi tersebut dalam gurauan berbahasa Sunda : "Jika tidak bisa, dia akan ganti dihabisi."

Presiden membuat keputusan penting yang membujarkan rencana besar Aidit. Keputusan yang sekaligus menempatkan Presiden di kursi kendali, dan sejak itu giliran Presiden lah yang melakukan tembakan.

Pertama, Presiden menggelar rapat presidium Kabinet Dwikora dan mengundang Perdana Menteri untuk hadir. Demikian pula tiga Panglima Angkatan, Pangal, Pangak, dan Pangau.

Kedua, Presiden tidak mengundang Aidit meskipun duduk sebagai menteri dalam Kabinet Dwikora.

Ketiga, Presiden memutuskan menggempur skema Aidit dengan memerintahkan Brigjen Sabur menulis pernyataan, dengan dibantu oleh Supardjo, bahwa dirinya selamat, sehat dan sepenuhnya memegang kendali pemerintahan yang segera disiarkan lewat radio. Dalam pelaksanaannya, siaran ini dibacakan sekitar pukul 11 siang namun diblok oleh Untung atas perintah Aidit hingga pukul 13.00 siang.

Supardjo mengirim salinan kedua dari pernyataan itu kepada Untung dan melalui Sjam kepada Aidit. Ketika Supardjo pamit hendak mengantarkan salinan surat itu Supardjo meminta kepada Presiden "mengirim penghargaan kepada teman-temannya." Presiden sambil menepuk bahu Supardjo berkata"baik, kembali lah segera, hati-hati, tunjukkan bahwa aku tidak tersingkir." (Hal. 180)

Dalam Otokritik yang ditulis Supardjo pertengahan Oktober 1966 tiga faktor inilah yang diyakininya berperan penting dalam kegagalan Gestapu dan kehancuran total PKI, termasuk salah strategi partai yang nekad menuruti kehendak Aidit.

Pembelotan Supardjo yang memihak Presiden sudah tentu di luar skenario PKI dan memaksa Aidit untuk menerapkan skenario jalan terus "tanpa" Presiden.Audit segera menyuruh Sjam menyiarakan teks Keputusan No. 1 Dewan Revolusi melalui radio pada pukul 11.00 pagi, sebelum Supardjo kembali dari CENKO II membawa siaran pers presiden buatan Sabur. Keputusan itu menyerang Sukarno tanpa ampun dengan sama sekali tidak menyebut nama serta jabatannya sebagai Presiden dan pada bagian lain dari keputusan itu menyebutkan susunan kekuasaan

yang baru. Keputusan No. 1 ditandatangani oleh Presidium yang terdiri dari Untung sebagai komandan, Brigjen Supardjo wakil komandan dari AD, Letkol Heru Atmodjo wakil komandan dari AURI, Kolonel Laut Sunardi wakil komandan dari AL, dan Komisaris Besar Polisi Anwas dari Kepolisian.

Pesan politik dari keputusan ini sangat jelas, Sukarno telah digulingkan dari kekuasannya, dijadikan rakyat biasa, dan harus menuruti kesepakatan sebelumnya tentang mundurnya dia secara terhormat dari kancah politik dan pensiun di negeri Cina.

Dalam analisis Fic, disiarkannya Keputusan No. 1 Dewan Revolusi segera melahirkan Dual Power (Kekuasaan kembar) yang berlangsung antara pukul 10.00 hingga pukul 16.00 tanggal 1 Oktober 1965. Terlebih Siaran pers yang mengabarkan Presiden biak-baik saja dan masih memegang tumpuk kekuasaan namun tidak menolak atau pun mengutuk pernyataan Dewan Revolusi memberikan keyakinan Fic bahwa saat itu telah terjadi kekuasaan kembar. Sementara Aidit telah merancang serangkaian aksi yang menunjukkan kekuasaan benar-benar telah berada di tangan kelompoknya.

Namun Aidit yang bersama kelompoknya berada di rumah Suwardi di Halim gagal menerapkan rancangan aksinya itu. Aidit yang sudah memilih skenario jalan terus tanpa Presiden mendapat kenyataan Presiden tak masuk perangkap bahkan balik mengendalikan permainan. Aidit terpaksa menggunakan skenario kedua yakni jalan terus "dengan" Presiden. ini dibuktikannya dengan mengijinkan disiarkannya Siaran Pers Presiden buatan Sabur-Supardjo pada pukul 13.00 siang. Yang berarti, Aidit mengangkat kembali Presiden setelah beberapa jam sebelumnya digulingkan dengan Keputusan No. 1 Dewan Revolusi.

9

LAKON WAYANG KULIT KOLOMONGSO SAAT MAKAN SIANG

Rumah Komodor Susanto: 1 Oktober 1965

Bab ini menjadi puncak dari paparan Victor M. Fic yang sangat memikat. Ia memilih judul dari khasanah pertunjukan tradisional khas Nusantara, Wayang Kulit dengan lakon yang disebutnya Kolomongso. Dengan itu, Fic mencoba merekonstruksi apa yang terjadi segera setelah muncul kekuasaan kembar (Presiden Sukarno dan Kelompok Pemberontak pimpinan Aidit) yang kini berhadap-hadapan. Menariknya, Fic menampilkan adegan demi adegan dalam peristiwa itu dengan merujuk kepada hasil penelitiannya terhadap berbagai data dan sumber yang berhasil dikumpulkannya. Membuat rekonstruksi menjadi terasa hidup, dramatis, namun tak kehilangan aspek keilmiahannya.

Adegan dibuka dengan bergesernya Presiden dari Pusat Komando Halim ke rumah Susanto yang lokasinya tak jauh dengan berjalan kaki. Sebelum meninggalkan Pusat Komando ia memerintahkan Komisaris Polisi Sumirat agar memanggil Men/Pangal Laksamana Madya R.E. Martadinata; Men/Pangak Inspektur Jenderal Polisi Sucipto Judodihardjo; Jaksa Agung Brigjen Sutardjo, dan Mayjen Umar Wirahadikusumah, Komandan Garnisun Jakarta. Ia juga mengirim pesawat kepresidenan ke Medan untuk menjemput Waperdam I Dr. Subandrio, menjemput Waperdam II Dr. Johannes Leimena dengan helikopter kepresidenan Sikorsky. Semuanya datang kecuali Dr. Subandrio yang masih di Medan dan

Mayjen Umar yang menolak datang dan mengirim pesan bahwa ia baru bisa datang kalau mendapat izin dari Jenderal Suharto. Sukarno pun memerintahkan Sumirat dan Widjanarko, dua ajudannya untuk pergi menjemput Umar yang tengah berada di Kostrad. Presiden juga menulis sepucuk surat untuk Dewi yang menyatakan bahwa ia sedang berada di tengah revolusi dan Dewi mesti berhati-hati dan tetap tinggal di rumah. Presiden beranjak dari Pusat Komando Halim pukul 11.30 diiringi Omar Dhani, Sabur dan yang lainnya.

Rombongan Presiden yang tiba di rumah Susanto untuk makan siang itu mewakili konsentrasi tertinggi otoritas politis Indonesia saat itu, karena yang hadir adalah para panglima dan para menteri di Kabinet Dwikora. Sebelum dan selama makan siang, Presiden mengarahkan diskusi dengan mengevaluasi kejadian-kejadian hari itu. Ia mengarahkan agar menjauh dari mengutuk pembunuhan para jenderal, menyinggung keberadaan Dewan Revolusi, dan bahwa suatu bentuk akomodasi terhadap Dewan harus dilakukan, kemudian meminta komentar dan saran dari mereka yang berkumpul. Presiden juga menyuruh Sabur untuk mengedarkan daftar nama-nama anggota Dewan Revolusi. Ruangan pun dipenuhi ketegangan akibat perbedaan pendapat yang disampaikan beberapa peserta, namun hampir semua peserta bersikap "wait and see" dan "after You" terkecuali Omar Dhani yang menyetujui perlunya mengakomodasi dewan itu.

Presiden sedang bermanuver dengan mengulur-ulur waktu dalam usahanya untuk mengdalikan diskusi seusia preferensinya. Ia mulai mengarahkan diskusi dengan menyatakan bahwa kejadian-kejadian seperti itu hal yang biasa dalam sebuah revolusi, "hanya sebuah riak kecil di samudera." kemudian mulai condong kepada pendirian Omar Dhani dengan menyarankan agar anggota kabinet yang hadir menerima

keanggotaannya dalam Dewan Revolusi karena revolusi Indonesia harus terus berjalan. Para menteri segera memahami arah pembicaraan Presiden dan mulai bermain mengikuti arah sang Presiden. Ketika Presiden merasa cukup dapat mengendalikan kabinetnya untuk mencapai suatu konsensus, ia memerintahkan Omar Dhani memanggil Supardjo untuk membuat kesepakatan dengan komandan komplotan, Aidit. Presiden yakin bahwa sekarang setelah berhasil memandu kabinetnya, ia bisa memenuhi komitmennya kepada Aidit dengan jalan menerima Dewan Revolusi dan pada saat yang sama menyodorkan posisinya sendiri dalam tatanan yang baru itu. Presiden dalam posisi di atas angin. (Hal. 198)

Panggilan itu tentu saja disambut gembira oleh Supardjo dan kawan-kawan, setelah pukulan Presiden lewat siaran pers menggoyahkan semangat mereka. Pukul 13.00 siang Supardjo datang ke rumah Susanto, masuk lewat pintu belakang dan kemudian diantar memasuki sebuah kamar samping untuk bertemu secara pribadi dengan Presiden. Fic menyebutkan bahwa tidak diketahui apa yang mereka berdua bicarakan di kamar dengan pintu tertutup itu. rekaman pengadilan sepenuhnya membisu mengenai hal itu. Tetapi Fic berhasil mewawancarai Leimena dan Judodihardjo dan berkesimpulan bahwa rupanya dalam pembicaraan itu presiden siap untuk membuat kesepakatan dengan Aidit. Presiden bersikeras agar namanya ada dalam daftar Dewan Revolusi, dan bahwa daftar itu harus juga mencantumkan nama-nama lain yang diinginkannya, sebagai konsesinya ia bersedia mengakui Dewan Revolusi. Presiden juga berharap Dewan Revolusi akan membubarkan diri setelah penunjukan Kabinet Gotong Royong oleh dirinya.

Supardjo kembali ke CENKO II dan disambut koleganya dengan gembira. Namun Aidit sulit diajak kompromi. Meski ia menerima beberapa nama ditambahkan dari usulan Sukarno, namun ia tetap menolak

mencantumkan nama Sukarno ke dalam daftar Dewan Revolusi. Dengan demikian Aidit kembali ke skenario Jalan Terus "tanpa" presiden. Dengan taktik ini Aidit mendapatkan keuntungan dengan membuat Presiden membawa presidium kabinetnya, termasuk para panglima angkatan ke bawah atap Dewan Revolusi. Tentu saja ada harga yang harus dibayar yaitu ia harus membiarkan Presiden tetap memegang kemudi negara, setidaknya untuk sementara waktu dan selama periode transisi. Namun Aidit tidak mengambil pengorbanan ini. Aidit justru memutuskan untuk melibas untuk kedua kalinya. Pada pukul 14.00 siang Aidit mengumumkan Dekrit No.1 melalui radio, nama Presiden Sukarno tidak tercantum dalam daftar anggota Dewan Revolusi, atau diakui sebagai kepala negara dan bahwa Kabinet Dwikora-nya telah didemisionerkan.

Ciri menonjol Dekrit No. 1 Dewan Revolusi adalah bahwa Dewan Revolusi telah mendongkel Sukarno dari kekuasaan, baik sebagai Presiden maupun Perdana Menteri; sebagai Presiden dengan jalan bersikap tidak menyinggung-nyinggung posisi kerpesidenan di bawah sistem pemerintahan yang baru dibentuk itu; sebagai Perdana Menteri dengan jalan membubarkan Kabinet Dwikora dimana Soekarno merangkap jabatan sebagai perdana Menteri. Dengan demikian Sukarno digulingkan dua kali oleh Aidit dalam tempo tiga jam. Bagaimana pun dari daftar itu Fic menunjuk setidaknya 21 dari 45 anggota Dewan Revolusi terafiliasi kepada PKI.

Tak lama kemudian, Aidit mengumumkan Keputusan No.2 Dewan Revolusi yang berisi penurunan pangkat semua perwira dalam struktur komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pun menjadi letnan kolonel dan menaikkan pangkat sejumlah perwira yang lebih rendah menjadi letnan kolonel pula. Keputusan menurunkan pangkat ini mendapat kritikan dari banyak pihak termasuk kolega Aidit di Politbiro,

Walujo melayangkan sepucuk surat kepada Aidit melalui Sujono yang menyatakan keberatan pada penyiarannya karena alasan-alasan psikologis. Presiden Sukarno marah besar ketika mendengar bahwa ia tidak dianggap sama sekali, dan para menteri/panglima angkatan sebagai jenderal-jenderal dan laksamana-laksamana , sekarang ditunjuk menjadi anggota Dewan Revolusi dan diturunkan pangkatnya menjadi letnan kolonel, membelot dari konsensus yang baru saja dihasilkan. Giliran Presiden yang kebingungan, tidak mampu membuat keputusan, dan berpaling kepada para penasihatnya, khususnya Judodihardjo, untuk mendapatkan bantuan dan pengarahan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Fic dengan Leimenna dikemukakan kondisi Presiden saat itu: "betapa memelasnya melihat Presiden dalam situasi itu, khususnya ketika melihatnya beristirahat di siang yang panas di salah satu kamar tidur, hanya dengan mengenakan celana boxer dan kaos singlet.

Presiden benar-benar marah besar. "Aku tidak ingin dipaksa, ini kabinetku," katanya, yang disambut oleh Jenderal Judodihardjo; "Ini adalah kudeta." sambil memberikan sejumlah saran-saran. Ini justru membuat Presiden sewot: "Jangan mendikte apa yang harus aku lakukan. Aku tidak ingin dipaksa oleh siapa pun. Aku akan memecahkan masalah ini sendiri." Presiden kemudian berpaling kepada Omar Dhani: " panggil Supardjo sekarang juga!"

Supardjo datang dan masuk lewat pintu belakang lagi. Ia langsung berdiskusi dengan Presiden di salah satu ruangan samping perihal kandidat yang akan menggantikan Jendreal Yan. Supardjo menyebut ada dua kandidat yakni Mayjen Basuki Rahmat dan Mayjen Pranoto. Ia mengusulkan kepada Presiden agar dirinya terlibih dahulu berkonsultasi dengan koleganya. Supardjo lalu pergi menghubungi Untung, Latief, Sjam, dan Aidit melalui Sjam.

Dalam tarik menarik yang terjadi antara Presiden dan Aidit ini terdengar kabar bahwa Jenderal Suharto dan Pasukan Kostrad sudah memasuki panggung. Ia diberi wewenang oleh Jenderal Nasution Menko Hankam/KASAB untuk melawan Untung. Supardjo kembali bergegas ke rumah Susanto menemui Presiden dengan membawa dua nama : Mayjen Rukman dan Mayjen Pranoto. Setelah bertemu kedua kalinya secara tertutup dengan Supardjo membahas usulan itu, Presiden bergabung kembali dengan menteri-menterinya dan berdiskusi membahas penggantian Yani. Omar Dhani menyarankan agar Presiden mengikuti apa yang berlaku di AURI, wakil mengisi kekosongan. Presiden menanggapi bahwa wakil pertama adalah Mayjen S. Mursyid, kemudian Mayjen Suharto, disusul Mayjen Suprapto. Ia menolak Mursyi karena menurutnya orangnya pemarah, begitu juga Jenderal Suprapto. Lalu Dhani bertanya "Bagaimana Harto dari Kostrad?" Sukarno juga menolak karena Suharto keras kepala. Ketika Omar Dhani menyodorkan nama Basuki Rachmat, Presiden berseloroh bahwa setiap kali ada masalah yang harus dipecahkan, Jenderal yang satu ini ini pasti mendadak sakit dan tak terlihat.

Akhirnya Presiden menetapkan Pranoto menjadi caretaker Panglima Angkatan Darat menggantikan Yani. Ia segera memerintahkan Sabur untuk membuatkan rancangan Perintah Harian Presiden tentang keputusannya itu. Supardjo segera meninggalkan rumah Susanto kembali ke CENKO II melaporkan keputusan presiden seusai harapan Aidit. Sabur mengetik Perintah itu dalam empat salinan dan ditandatangani sekira pukul 16.00 oleh Presiden Sukarno. Satu diberikan kepada Supardjo untuk disampaikan kepada Untung dan Aidit, yang kedua dikirim ke stasiun radio untuk disiarkan, yang ketiga dibawa oleh Martadinata untuk diserahkan kepada Suharto di Kostrad. Pada jam 17.00 Sabur mengutus Widjanarko untuk memanggil Pranoto dari rumahnya menghadap Presiden secepatnya.

Sebenarnya Pranoto ada bersama Aidit di markas besarnya di Halim. Namun tak lama setelah salinan Perintah Harian sampai di tangan Aidit via Supardjo, Aidit mengutusnya untuk pergi ke Kostrad guna memerintahkan Suharto, yang dengan perintah harian itu otomatis menjadi bawahannya, untuk menghentikan semua operasi menentang GESTAPU, dan memerintahkan seluruh unit AD di seluruh negeri untuk berada di belakang Dewan Revolusi.

Fic mengungkapkan bahwa bahkan sebelum naskah itu selesai dibuat oleh Sabur ternyata Presiden telah meminta Omar Dhani memanggil Supardjo untuk melapor secepatnya. Supardjo langsung masuk ke kamar Presiden pada pk.15.30, untuk mengadakan pembicaraan pribadi sekali lagi. Lagi-lagi, tak didapat informasi apa yang keduanya bicarakan di balik pintu tertutup itu. Fic menyodorkan sejumlah kemungkinan, salah satunya yang menurutnya sangat kuat ialah adanya kesepakatan informal antara keduanya untuk membela sang Presiden dari kemungkinan serangan terhadap Halim oleh Pasukan Kostrad yang disebutnya sebagai NATO (singkatan dari NAsution dan SuharTo) yang telah dikabarkan semakin mendekat.

Masih dalam rangkaian mengamankan diri dari serangan NATO, Presiden memanggil Mayor Udara Subardjono, pilot pesawat Jet Star Kepresidenan, ke kamar tidurnya. Presiden memberi sepucuk surat untuk disampaikan kepada Mayjen Ibrahim Adjie, panglima Divisi Siliwangi di Bandung. Isinya meminta agar siap datang untuk menyelamatkannya di Halim jika ia memanggil, dan agar memberikan keamanan bagi anak-anaknya dengan melindungi mereka. Surat itu dipercayakan Subardjono kepada Kapten Djarkashi yang menerbangkan Dakota khusus mengantar surat itu ke Bandung. Menyusul kemudian, Jenderal Ibrahim Adjie mengeluarkan sebuah peringatan bahwa ia akan memerintahkan

pasukan Siliwangi bergerak ke Jakarta jika Preesiden berada dalam bahaya dari pihak manapun.

Supardjo meninggalkan rumah Susanto pada menjelang pukul 16.00. Presiden dengan wajah murah senyum keluar kamar, tampil sebentar dan bergabung dengan anggota kabinetnya. Ketegangan sedikit mereda dan mereka beristirahat dengan tidur-tidur ayam. Setelah pukul 16.00 sore Dewi Ratnasari muncul di rumah Susanto. Ia mengkhawatirkan nasib suaminya. Ia berbicara sebentar dengan para tamu sebelum kemudian masuk ke kamar untuk menghibur suaminya. Presiden kemudian memerintahkan agar anak-anaknya dijemput dari Istana Merdeka untuk dibawa ke Halim. Sekitar pukul 17.00 sore sebuah helikopter membawa Rachmawati, Sukmawati, dan Guruh dari Istana dan menerbangkan mereka ke Halim untuk kemudian ke Bandung dengan pilot Kapten Udara Suhardono.

Suharto mengirim Kolonel Tjokropranolo ke Halim dengan sebuah pesan untuk Presiden, bahwa ia telah untuk sementara memegang komando atas AD, atas perintah dari Jenderal Nasution, Menko Hankam/KASAB, dan bahwa ia menempatkan dirinya di bawah Presiden dengan menunggu perintah lebih lanjut. Sebelum kembali, Tjokropranolo mendapat pesan balik bahwa Presiden menunjuk Mayjen Pranoto untuk menduduki posisi itu dan Martadinata sudah dalam perjalanan ke KOSTRAD untuk menyampaikannya kepada Suharto.

Memang, sejak pertemuan dengan Latief di rumah sakit malam 30 September 1965, Suharto diketahui tidak menunjukkan aktivitas berarti selain tetap berdiam menunggu puteranya Tommy yang tengah dirawat karena tertumpah Sup panas pada hari sebelumnya. Baru tengah malam ia meninggalkan rumah sakit untuk pulang

beristirahat. Pagi harinya, Suharto tak perlu menunggu lama untuk mengetahui nasib Presiden, bintang pedomannya itu. Pukul 7.20 ia mendengar siaran radio tentang komunike GESTAPU dan dirinya bergerak cepat. Ia bergegas ke kantornya, memanggil stafnya untuk briefing, mengarahkan mereka untuk mengumpulkan informasi tentang kejadian semalam dan menganalisis arti komunike Gestapu yang disiarkan pagi itu.

Tak lama Mayjen Umar Wirahadikusuma tiba di KOSTRAD setelah sejak dini hari mengelilingi ibukota sebagai Komandan Garnisun Jakarta. Menyaksikan dan melaporkan kejadian yang dijumpai selama berkeliling termasuk laporan penculikan dan penembakan jenderal-jenderal. Umar juga melaporkan bahwa ia bertemu Brigjen Supardjo di Istana, tengah memimpin delegasi untuk menemui Presiden namun tak berhasil ditemuinya. Suharto tersadar bahwa Supardjo, anak buahnya yang sedang diberi tugas di Kalimantan, telah meninggalkan pos nya tanpa melapor kepada dirinya.

Mendapati laporan bahwa Jenderal Yani terbunuh dan Jenderal Nasution terluka, Suharto berinisiatif cepat bahwa ia untuk sementara memegang komando AD. Inisiatif itu segera mendapat persetujuan dari para koleganya dan Jenderal Nasution yang berhasil melakukan kontak dari tempat persembunyiannya pada 8.30 pagi. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Tjokropranolo yang diutus Suharto menemui Presiden di Halim pada siang harinya. Sementara Nasution yang terluka segera bergabung ke KOSTRAD pada sore harinya. Suharto juga menolak halus perintah Presiden tentang Pranoto yang disampaikan oleh ajudannya Bambang Widjanarko bahkan sebaliknya meminta agar Presiden segera meninggalkan Halim.

Martadinata tiba di Kostrad untuk menyampaikan salinan Perintah Harian yang berisi bahwa Presiden telah memegang komando langsung AD dan menunjuk Pranoto sebagai caretaker. Nasution turut bergabung dalam pembicaraan antara Martadinata dan Suharto. Ia mencerca habis-habisan Martadinata dan mengingatkan agar dia dan yang lain-lain jangan campur tangan dalam urusan murni intern AD. Nasution juga menyatakan bahwa ia masih hidup dan tidak dapat dilewati dalam masalah penunjukan jabatan di AD. Suharto kemudian menyuruh Martadinata agar memberitahu Presiden bahwa ia sendiri telah memegang komando sementara atas AD sepersetujuan Nasution. Suharto juga tak mengijinkan Pranoto melapor kepada Presiden, dan jika Presiden membutuhkan bantuannya dapat mengontak dirinya di Kostrad.

Suharto memang tidak main-main. Ia segera mengkonsolidasi pasukan dan pada pukul 18.30 Suharto berhasil merebut stasiun radio dan pusat komunikasi. Dan akhirnya pada pukul 19.30 orang-orang di CENKO II mendengar pengumuman radio pertama oleh Kostrad bahwa objek-objek vital itu telah dibebaskan dari kendali Gestapu dan bahwa pembebasan itu dilakukan oleh pasukan yang tetap loyal pada presiden. Memang, Pasukan Gestapu telah menjadi kacau balau meninggalkan posisi-posisi mereka di Lapangan Merdeka dan membelaot ke Kostrad yaitu dua kompi dari Batalyon 454 dari Jawa Tengah dan seluruh Batalyon 530 dari Jawa Timur. Pasukan yang tersisa kehilangan semangat karena kekurangan makan.

Mendapati perkembangan terbaru dengan keberhasilan Suharto mengkonsolidasi pasukan perlawanan, CENKO II menjadi kacau balau. Rapat para pemimpin pemberontak terjadi berlarut-larut dan banyak pandangan saling bertentangan. Situasi menjadi lebih rumit oleh "mekanisme konsultasi" yang sangat tanggung dan memakan waktu,

dimana setiap tindakan harus disetujui oleh Aidit yang berada di markas besarnya di rumah Suwardi di Halim. Sujono mondar-mandir menjadi penghubung antara CENKO II dan markas besar. Akhirnya rapat mengambil tiga keputusan besar. Pertama, semua aktivitas yang ditujukan untuk menggusur Presiden harus dihentikan saat itu juga. Kedua, otoritas konstitusional Presiden harus diakui, khususnya mengingat Suharto telah merebut komando AD dengan menentang perintah Presiden. Ketiga, operasi militer akan dilanjutkan untuk membela Presiden dari ancaman pasukan NATO (Nasution-Suharto) dan serangan yang mereka rencanakan terhadap Halim.

Menjelang malam Sjam memerintahan semua pasukan dari Lapangan Merdeka ditarik ke Halim untuk melindungi Presiden. setiba mereka di gerbang masuk Halim, atas hasil konsultasi dengan Komodor Leo Wattimena pasukan diarahkan ke Pondok Gede untuk bergabung dengan Pasukan GESTAPU yang ditempatkan disana. Belakangan, Mayor Udara Gathot Sukrisno muncul di kantor Kolonel Wisnu, perwira intelijen pangkalan udara, meminta izin membawa 2000 senapan dari depot AURI untuk mempersenjatai kesatuan-kesatuan di Pondok Gede, tapi permintaannya ditolak.

Pada bagian lain, Fic dalam bab ini juga merekonstruksi apa yang dilakukan Sukarno menyikapi pergerakan pasukan yang dikirim Suharto yang semakin mendekati Halim. Menjelang pukul 18.00 Supardjo atas inisiatif sendiri kembali datang menemui Sukarno. Mereka berdiskusi tentang usaha-usaha melindungi Presiden dari serangan Suharto. Kini muncul aliansi baru antara Presiden dan GESTAPU, untuk menghalau pemeran tak diundang dari panggung. Supardjo meminta otorisasi dari Presiden untuk menyerang pasukan Suharto di Kostrad. Tetapi usaha nekad itu tak disetujui Presiden. Bahkan Presiden memerintahkan Supardjo agar

melepaskan rencananya itu, menghentikan tembak menembak, dan membubarkan pasukannya. Jelaslah, Presiden ingin masuk ke dalam perlindungan Suharto dengan catatan yang bersih. Gerakan telah gagal. Sujono membawa Sjam, Untung, dan Supardjo ke dalam mobilnya dan melarikan mereka ke markas besar Aidit untuk menggelar rapat darurat guna melaporkan kegagalan aksi mereka.

Rapat darurat itu dihadiri oleh Aidit dilangsungkan pada pukul 21.00 dalam suasana muram. Ada juga Lukman dan Nyono mewakili Politbiro, dan Sjam mewakili Biro Chusus; dan Untung, Supardjo, Sujono mewakili Dewan Revolusi. Setelah mendengarkan laporan Sjam dan berdiskusi panjang tentang posisi terakhir gerakan rapat itu agaknya memutuskan untuk meninggalkan strategi jalan terus tanpa Presiden dan mengantikannya dengan aliansi baru atas dasar kerjasama melawan NATO. Dengan demikian, semua aktivitas bermusuhan melawan Presiden segera dihentikan, sementara perjuangan mewalan pasukan NATO harus diteruskan dan dikembangkan lebih lanjut. Diputuskan pula Aidit akan pergi ke Jawa Tengah untuk mengorganisir kebangkitan rakyat yang anti-NATO. Mereka juga berusaha untuk tidak membiarkan Presiden dibawa ke Bogor, membebaskan Presiden dari cengkeraman NATO dan menyelundupkannya ke Yogyakarta untuk menjadikannya Kepala Pemerintahan Darurat Dewan Revolusi. Jika Presiden tak berhasil dibebaskan dari cengkeraman NATO atau terjadi sesuatu atas dirinya, maka Omar Dhani akan dikukuhkan menjadi presiden. Pukul 01.00 dinihari tanggal 2 Oktober 1965 berkat bantuan Sujono akhirnya Aidit berhasil terbang ke Yogyakarta.

Fic mendapatkan informasi penting terkait aktivitas Aidit selesai rapat dan sebelum terbang ke Yogyakarta. Dikemukakannya bahwa setelah kawanannya pergi Aidit memanfaatkan fasilitas komunikasi khusus, atau

saluran-saluran AURI, untuk berhubungan dengan Peking dan tempat-tempat lain. Fic menduga saat itu Aidit menghubungi pihak China tentang rencana mengalihkan Presiden dan Pemerintah Darurat ke Yogyakarta dan rencananya untuk memulai suatu "counter offensive revolutioner" termasuk permintaan dukungan senjata dan bantuan lainnya. Hanya saja, hingga November 1965 bantuan itu tak juga datang, seperti dikeluhkan oleh Aidit dalam suratnya tertanggal 10 November 1965. "Banyak harapan yang tidak dipenuhi bukan hanya "partai-partai sekawan" tetapi juga oleh Presiden dan Subandrio. "Kelas tidak membuktikan kesetiakwanan apalagi memenuhi janji yang telah diucapkan." Fic menilai, boleh jadi Peking sudah menganalisis peluang Aidit sudah sangat kecil.

Di lain pihak, menyusul keputusan rapat darurat itu. Sujono dan Supardjo membriefing Omar Dhani. Kemudian, baik Supardjo maupun Omar Dhani secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berusaha meyakinkan Presiden agar mau pergi ke Yogyakarta. Sementara itu, setelah Aidit terbang, Sjam bersama Supardjo berangkat ke Lubang Buaya untuk menjalankan hasil keputusan rapat darurat yang lainnya yakni perjuangan melawan pasukan NATO harus dilanjutkan. Sementara dari jauh terdengar rentetan tembakan dari pasukan RPKAD mulai mencari kontak tembakan.

Pada siang harinya para komplotan ini kemudian berpencar dan bersiap untuk melakukan penyelamatan diri masing-masing. Mereka berpencar, Sjam pergi ke Bandung, Pono dan Waluyo ke Jawa Tengah, dan Hasim dan Sujono tetap di Jakarta. Dokumen penting partai dipindahkan dan dipercayakan pengamanannya kepada Sudisman.

10

OFENSIF SUHARTO

1 Oktober 1965

"Saya memberi prioritas tinggi pada penghindaran pertumpahan darah. Saya sebenarnya dapat merebut kembali stasiun radio pada pagi hari itu. Tetapi ini akan menimbulkan tembak menembak, dan pada saat itu saya masih belum tahu latar belakang yang sesungguhnya dari Gerakan 30 September. Setelah Dewan Revolusi dan susunannya diumumkan melalui siaran radio, barulah kegiatan-kegiatan mereka yang sebenarnya, tersingkap, yang meyakinkan kami bahwa kami tidak perlu lagi ragu-ragu untuk mengambil tindakan terhadap Gerakan 30 September." Demikian pengakuan Suharto yang dikutip Fic tentang latar belakang dimulainya serangan balik atas usaha kudeta Gestapo.

Begini mengetahui siapa di balik gerakan itu pada pk. 14.00 tanggal 1 Oktober 1965 Suharto bergerak melancarkan operasi ofensif yang mula-mula dengan mengupayakan perundingan, penarikan sebagian besar anggota Batalyon 530 dari tugas mereka menjaga istana. Untuk taktik itu ia mengutus Mayjen Basuki Rahmat yang cukup mengenal sejumlah komandan pasukan Batalyon 530, Mayjen Sobirin Mochtar yang pernah menjadi komandan Batalyon itu, dan Kolonel Ali Murtopo. Ketika ketiganya berada di tengah para prajurit dan menyatakan hendak mencari komandan mereka dengan sikap ramah, para prajurit yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi memberi hormat dan memberi

tahu bahwa komandan mereka sejak pagi sekali pergi ke Istana bersama Brigjen Supardjo menghadap Presiden. Ketiganya pun meminta para wakil komandan kedua Batalyon itu untuk datang ke markas Kostrad yang tak jauh dari lokasi mereka. Suharto menyambutnya dengan penuh keramahan. Setelah itu Suharto memberikan penjelasan: "Saudara-saudara mengawal istana yang kosong, karena Presiden sekarang sedang di Halim, sebagai tawanan Untung. Sekarang, jika saudara-saudara masih setia kepada revolusi dan sumpah prajurit, kumpulkan anak buah saudara dan kembali ke sini melapor pada saya. Jika tidak, saya terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap saudara-saudara." (Hal. 236)

Pertemuan bersahabat itu ternyata sangat berpengaruh. Batalyon 530 terpecah, dan pada pukul 16.00 banyak prajurit meninggalkan Medan Merdeka dan melapor ke Kostrad, putar haluan ikut serta dalam operasi pembersihan di bawah Suharto. Namun demikian, Batalyon 454 menolak putar haluan, hanya dua kompi yang bersedia, selebihnya gigih bertahan menduduki dan mengawal stasiun radio dan pusat telekomunikasi sampai mereka menyerah keesokan harinya.

Penyerbuan untuk menguasai kembali stasiun radio dan pusat telekomunikasi dipercayakan kepada RPKAD, pasukan parakomando, yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhy dan kepada sebuah batalyon Divisi Siliwangi yang kebetulan beberapa hari sebelumnya datang ke ibu kota untuk bersiap mengikuti peringatan Hari Angkatan Bersenjata. Pada pukul 18.00 mereka menyerbu dan berhasil dengan cepat mengusir keluar pasukan Gestapu pada pk. 18.30 tanpa terjadi kontak senjata. Pada pukul 20.00 gedung-gedung itu sepenuhnya berhasil dalam penguasaan Pasukan Suharto.

Usai sukses menguasai radio dan pusat telekomunikasi, Batalyon 530 diberi tugas mengamankan daerah sekitar gedung. tak lama kemudian, muncul beberapa truk yang membawa unit Pemuda Rakyat dari Lubang Buaya yang berniat menduduki gedung Front Nasional di dekat situ. Sekali lagi Pasukan Suharto berhasil meringkusnya, bahkan sejumlah anggota Pemuda Rakyat berhasil ditawan. Dari mereka itulah Suharto akhirnya mengetahui jumlah dan aktivitas Pemuda Rakyat di Lubang Buaya di bawah naungan AURI. Informasi yang menjadi bekal berharga bagi Suharto untuk mengambil langkah lebih cepat.

Pukul 20.50 Jenderal Suharto mengumumkan lewat siaran radio bahwa Gerakan 30 September adalah sebuah komplotan kontra-revolusi, sebuah komplotan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah, dan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut anggota komplotan itu telah menculik beberapa Jenderal AD dan merebut stasiun radio, pusat telekomunikasi dan gedung strategis lainnya di ibu kota Jakarta. Menko Hankam/KASAB Jenderal Nasution, dan Presiden Sukarno, selamat dan sehat wal afiat, dan Jenderal Suharto telah mengambil komando AD untuk sementara. Situasi umum Kota Jakarta sudah dapat dikendalikan, dan operasi-operasi keamanan dengan cepat dilancarkan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Rakyat hendaknya tetap tenang dan tetap melakukan kegiatan sehari-harinya seperti biasa.

Sekaranglah saatnya bagi Jenderal Suharto untuk bergerak merebut pusat persekongkolan itu, Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdama Kusuma. Masalahnya, Presiden Sukarno ada di Halim. Selama ada Presiden di Halim, Suharto tidak mau mengeluarkan perintah untuk menyerang. Namun ia tidak punya banyak waktu. Pukul 20.00 ia memutuskan untuk mengirim pesan agar Presiden meninggalkan Halim karena ia akan mengambil tindakan.

Presiden sekarang dihadapkan pada tekanan sangat berat dari berbagai penjuru yang bertentangan satu sama lain. Ia masih berada di rumah Susanto di Halim. Disatu pihak ada Widjanarko dan Sabur yang menuruti perintah Suharto mendesak Presiden segera pergi ke Bogor. Usaha ini di dukung oleh Dr. Leimena dan Sutjipto. Di pihak lain ada Omar Dhani dan Supardjo yang mendesaknya agar terbang ke Madiun atau Yogyakarta.

Sekitar pk. 20.00 Dr. Leimena dan Sutjipto meminta bertemu dengan Presiden secara pribadi di kamar tidurnya untuk meyakinkan dia agar pergi ke Bogor saja. Namun bertepatan dengan itu Dewi Ratnasari muncul di kamar dan langsung menggandeng suaminya dan membawanya ker kamar sebelah berbicara empat mata juga mendesaknya pergi ke Bogor. Omar Dhani tak tinggal diam, ia melakukan upaya terakhir. Dhani cepat-cepat masuk ke kamar tempat Sukarno dan Dewi sedang berbicara, memotong pembicaraan mereka dan membawa Presiden ke kamar yang lain sekali lagi untuk meyakinkan agar mengikuti rencana Aidit pergi Yogya. Namun ia gagal. (Hal. 240)

Begitu selesai Dhani bicara, Dr. Leimena masuk ke kamar menyaksikan Presiden dengan rasa khawatir dan berkata: "sudah tiba waktunya," lalu membimbing Presiden seperti anak kecil menuju mobil yang sudah disiapkan Widjanarko. Hati Presiden sangat galau. Ia akhirnya menuruti perintah Suharto namun menolak pengawalan bersenjata. Konvoi terdiri dari dua mobil saja. Presiden menaiki mobil Princess dan duduk di kursi belakang didampingi Dr. Leimena. Sedangkan tiga orang berada di kursi muka yakni Widjanarko, Suharso pengawal dan Letnan Kolonel Suparto sebagai pengemudi. Sementara mobil kedua membawa Kolonel Saelan, Brigjen Sabur, dan seorang anggota staf presiden yang lain. Semula Omar Dhani ingin ikut, ia mengantarkan Presiden sampai ke mobil, tetapi harus tinggal karena mobil sudah penuh. Konvoi keluar dari Halim pk. 22.30

dan tiba di Istana Bogor pk. 23.45 menjelang tengah malam. Sebelum konvoi melaju, Saelan mengirim kurir ke Kostrad menyampaikan pesan bahwa Presiden memutuskan pergi ke Bogor. Demikian juga setelah sampai di Istana Bogor, Saelan menelpon Suharto dan Jenderal Ibrahim Adjie, Pangdam Siliwangi, bahwa Presiden telah sampai dengan selamat.

Sepanjang perjalanan Presiden sangat gugup. Dilaporakan bahwa ia tiga kali bertanya kemana ia akan dibawa. Presiden meminta kepastian beberapa kali kepada Leimena maupun Widjanarko bahwa ia memang akan dibawa ke Bogor. Ketika mobil memasuki gerbang istana Bogor, Presiden bertanya kepada Widjanarko apa pendapatnya mengenai "pergerakan pasukan Kostrad". Widjanarko menjawab bahwa "saya lihat pasukan-pasukan itu dan ketika saya dengar pembicaraan-pembicaraan itu di Kostrad, saya berkesimpulan bahwa serangan atas Halim dapat terjadi sewaktu-waktu." Kini, Presiden tahu ia menghadapi masalah besar. Presiden kini menghadapi kenyataan sudah terlempar ke sudut lain dalam segitiga strategis itu. Bahwa ia terbebas dari cengkeraman PKI dan sekarang masuk dalam kendali ketat Angkatan Darat. Ini jelas bukan buah yang diharapkan akan dipetiknya ketika ia bersepakat dengan Aidit dan Mao pada Agustus silam.

11

AKIBAT-AKIBAT KUDETA YANG GAGAL ITU

2 Oktober 1965

Victor M. Fic membuka bab ini dengan mengomentari fakta yang bahwa meski Presiden sudah berada dalam kendali ketat Pasukan Suharto namun hubungan dengan PKI tak putus sama sekali. Ia menunjuk fakta bahwa Presiden kemudian memberikan perlindungan pribadi kepada Supardjo yang mengajaknya tinggal di Istana Bogor, di paviliun kanan, dekat Kebun Raya Bogor, dari tanggal 2 sampai 5 Oktober 1965. Setelah itu, mereka memulai surat menyurat, pada kesempatan itu Presiden mendesak Supardjo untuk menyusun semua kekuatan yang masih loyal untuk mengambil tindakan guna melepaskannya dari kungkungan kontrol ketat Suharto. Presiden berharap bahwa PKI tetap berperan sebagai kekuatan pengimbang melawan AD, yang telah penuh kendali sekarang dan mulai membayang-bayanginya. Namun harapan Presiden sia-sia karena segitiga besi sekarang betul-betul patah, tak dapat diperbaiki lagi, sehingga tak mungkin lagi bagi pemimpin ulung itu mengambil langkah-langkah penyeimbang untuk mempertahankan kekuasaannya. (Hal. 243)

Selebihnya, Fic menguraikan akibat-akibat yang diderita oleh komplotan kudeta yang gagal ini. Aidit yang terbang ke Yogyakarta pada 2 Oktober dini hari mendapatkan kenyataan bahwa tidak ada tanda-tanda revolusioner yang dapat digunakan guna merebut kekuasaan di kota-

kota, desa-desa di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Keadaannya jauh dari yang diharapkan. Demikian pula ketika ia meluncur ke Semarang dan melakukan rapat darurat dengan sejumlah tokoh PKI daerah untuk menegaskan garis kebijakan yang baru bahwa partainya tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan oleh Untung dan kawan-kawan dan bahwa peristiwa itu semata-mata persoalan dalam tubuh AD. Pada petang harinya Aidit menuju Boyolali dan kemudian Solo. Di sini petinggi daerah malah mengecamnya, mereka malah menolak hasil pertemuan Semarang dan sebaliknya mendukung sepenuhnya operasi Gestapu dan tujuan-tujuannya, bahkan mendesak perjuangan bersenjata harus dilancarkan untuk mendukung gerakan itu. (Hal. 249)

Akibat dua kebijakan yang bertentangan ini, PKI di Jawa Tengah menjadi terbelah, sebagian menjadi sayap radikal mengikuti kebijakan Solo dan sebagian lagi sayap moderat mengikuti kebijakan Semarang. Ini yang menurut Fic menjadi pangkal kekacauan dalam tubuh PKI seluruh Jawa pada fase berikutnya. Kelak, perpecahan itu begitu mendalam dan permanen, dengan para anggota sayap yang satu pergi ke pengasingan di Moskow, Praha, dan Amsterdam, sedangkan anggota sayap yang lain pergi ke Peking Vietnam, dan Albania.

Dalam keadaan partai yang terpecah inilah Aidit menulis surat kepada Presiden bertanggal 6 Oktober 1965 sebagai salah satu hasil keputusan rapat Politbiro di Blitar, Jawa Timur sehari sebelumnya. Surat diantar oleh Nyono dan dibacakan dalam sidang Kabinet Dwikora di Istana Bogor di hadapan Presiden Sukarno. Menurut Fic, dengan menunjukkan bukti-bukti yang berhasil diungkap sebelumnya, isi surat Aidit penuh dengan kebohongan. Fic menyebutnya "Kebohongan terbesar sepanjang masa. Surat itu memang berisi penyangkalan dan alibi terkait posisinya dalam persitiwa di Jakarta dan sekali lagi membuat kesimpulan sendiri bahwa

G30S adalah akibat daripada salah urus di dalam Angkatan Darat. Inti surat itu sendiri adalah enam usulan Aidit kepada Presiden guna mencapai penyelesaian politik bagi krisis yang ditimbulkan akibat G30S yang dikenal sebagai Pernyataan Biro Politik Partai Komunis Indonesia. Hanya saja AD sudah terluka, yang sekarang dipimpin Jenderal Suharto, siap mengerahkan tenaga untuk memburu dan membongkar komplottan Aidit sampai ke akar-akarnya dan menyeret mereka ke depan pengadilan. Langkah-langkah Aidit siap dimatikan oleh Suharto.

Aidit pun bersembunyi. Dari persembunyiannya Aidit menulis surat yang terakhir bertanggal 10 November 1965 yang berisi instruksi-instruksi tetap CCPKI. Surat ditujukan kepada komite daerah seluruh negeri. Dalam surat itu Aidit mengakui bahwa GESTAPU telah membawa kehancuran yang luar biasa bagi partai. Ia menyatakan bahwa semua itu karena Presiden dan CINA "tidak memberikan bukti-bukti mengenai solidaritas mereka" dan mereka ingkar janji.

Aidit tidak sempat menyaksikan bagaimana kehancuran habis-habisan yang diderita partainya. Tidak lama setelah itu, Pasukan Suharto mencium keberadaannya di Desa Sambeng, Solo, Jawa Tengah. Kamarnya nyaman, dilengkapi lemari berpintu ganda yang dibuat khusus untuk bersembunyi dalam keadaan darurat. Bila dibuka akan terlihat pakaian-pakaian tergantung di kapstok, tetapi dibalik pakaian-pakaian itu ada sebuah dinding lagi yang memisahkan bagian depan almari dengan sebuah tempat bersembunyi di belakangnya. Pasukan Kostrad yang dipimpin oleh Yasir Hadibroto menggerebek kamar itu, yang tampaknya kosong, dan ketika pasukan hendak meninggalkan kamar itu ada yang melihat sebuah cangkir kopi yang masih mengeluarkan asap panas di atas meja dan sepasang sendal di bawah kursi. Kamar itu digeledah, lemari disingkirkan, dan Aidit ditemukan di baliknya.

Mayor Moes Subagio menangkap Aidit. Konon, Aidit kemudian menulis sebuah dokumen sepanjang 50 halaman berisi sebuah pengakuan, diambil fotonya ketika menandatangani dokumen itu, dan kemudian ditutup matanya, kembali diambil fotonya, lalu atas perintah Yasir Hadibroto ditembak mati.

12

PENGHANCURAN PKI: AGEN KEKUATAN ASING

Harapan Aidit memudar setelah Jenderal Suharto bertemu pertama kali dengan Presiden pada Sabtu, 2 Oktober 1965 di Bogor. Setelah itu Presiden membuat pernyataan yang disiarkan pada minggu 3 Oktober pk. 13.30 yang menunjukkan hakikat dari penyelesaian yang disepakati kedua orang itu. Dimana menegaskan bahwa Pimpinan AD berada sepenuhnya ditangan Presiden, tetapi ia telah mengangkat Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker untuk urusan sehari-hari, sedangkan Jenderal Suharto diangkat untuk "melaksanakan pemulihkan keamanan dan ketertiban dalam kaitan G30S.

Pada minggu sore muncul juga pengumuman dari Presiden yang disiarkan radio yang mengatakan ia mengeluarkan pernyataan itu untuk menghilangkan beberapa salah paham yang telah muncul dan menimbulkan ketegangan di antara angkatan bersenjata. Presiden mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai keterlibatan AURI dalam G30S sama sekali tidak benar, dan bahwa ia pergi ke Halim pada 1 Oktober sepenuhnya atas kemauan sendiri. Ia yakin pada waktu itu Halim adalah tempat yang terbaik baginya, karena dekat dengan pesawatnya. Akhirnya ia menyerukan kepada angkatan bersenjata dan kepada rakyat seluruhnya agar tetap waspada dan menolak setiap usaha untuk mengadu domba AURI dan AD, karena konflik hanya akan menguntungkan Nekolim.

Angkatan Darat tampaknya tidak tertarik dengan penyelesaian politik seperti yang disodorkan oleh Aidit. Pasukan Jenderal Suharto kini memiliki legitimasi untuk memburu para pembunuh jenderal-jenderal dan lebih dari itu membersihkan siapa pun yang menjadi bagian langsung mupun tidak langsung dari Partai Komunis Indonesia yang diyakini sebagai dalang dari G30S itu.

Kini Jenderal Nasution dan Jenderal Suharto bahu membahu menggempur Aidit dan komplotannya. Menyusul persetujuan usulan Aidit pada Sidang Kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965, Jenderal Nasution mengirim nota kepada Presiden yang berisi lima butir permintaan: 1) menegakkan keadilan dengan segera mengadakan Mahkamah, karena bukti-bukti sudah sangat banyak; 2) mengangkat segera Men/Pangad yang baru (Mayjen Suharto sebagai satu-satunya calon; 3) "retooling" dalam pimpinan AURI yang terlibat GESTAPU; 4) Pelaksanaan Pen Pres & terhadap orpol/ormas yang terlibat (PKI) dalam perencanaan dan pelaksanaan GESTAPU; 5) untuk mengatasi iklim fitnah yang jadi sumber penghasutan dan khianat dan aninya besar ini (terhadap Angkatan Darat), perlu penertiban badan-badan intelijen dengan tenaga-tenaga yang berakhhlak dan ahli. *Supplier* fitnah inilah kiranya yang paling berdosa. (Hal. 281)

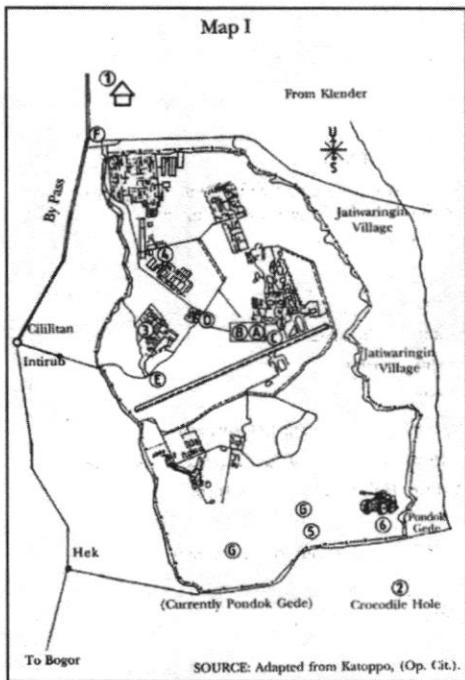
Tekanan itu memperoleh hasil. Presiden membatalkan pengangkatan Pranoto dan menyetujui pengangkatan Jenderal Suharto sebagai Men/Pangad baru pada 1 Nopember 1965. Meski begitu sikap Presiden semakin membawanya kepada kegaduhan-kegaduhan dan petualangan-petualangan baru. Reaksi yang kemudian memicu reaksi negatif dari organisasi seperti KAMI, KAPI, KAPPI, KASI, KABI dan sejenisnya. Dan pada 9 November 1965 Jakarta menyaksikan demonstrasi besar-besaran yang pertama yang diadakan di Lapangan Banteng oleh

Badan Koordinasi Penumpasan Gerakan Kontra-Revolusi 30 September yang menuntut pembubaran PKI segera. Sehari berikutnya, pada saat peringatan Hari Pahlawan, Presiden hanya menjawab dengan kata-kata akan mempertimbangkan hal itu. Ia dalam keadaan gundah, terus menerus mengulangi bahwa revolusi harus jalan terus, mengancam semua orang dengan tindakan balasan kilat. Disinilah untuk pertama kalinya, Wahyu Cakraningrat dan kharismanya, disaksikan oleh banyak orang, tampak jelas mulai pudar.

13

KESIMPULAN

Pada bagian ini, Fic menarik sebuah kesimpulan yang cukup gamblang tentang drama terbesar dan paling berdarah dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia ini. Fic meyakini bahwa tindakan Aidit menyalahkan Presiden atas kegagalan G30S benar adanya. Karena Presiden tidak memenuhi janjinya untuk membentuk Kabinet Gotong Royong setelah pembersihan dilakukan; dan karena Presiden berubah sikap tentang rencana kepergiannya ke Cina untuk bersitirahat di Danau Angsa. Mengapa Presiden melakukan itu? Sebuah rahasia yang dibawa ke dalam kuburnya di Blitar. Fic hanya membuat konklusi bahwa kesehatan Presiden yang semula memburuk justru berubah membaik, seperti dilaporkan oleh Dr. Mahar Mardjono, tampil dengan semangat menala guna mempertahankan kekuasaannya yang digoyang. PKI yang bertekad mendirikan negara berdasar komunisme di Indonesia mengambil langkah *pre-emptived*. Aidit, Ketua Umum PKI salah memilih opsi dalam meraih kekuasan dengan berjalan tanpa Presiden ditambah tampilnya Jenderal Suharto sebagai kuda hitam yang cerdik menangkal tindakan *pre-emptive* itu. Ini harus dibayar mahal bukan hanya oleh semua anggota komplotan pelaku kudeta tapi juga partai komunis Indonesia dan para pengikutnya. Lebih dari itu, Fic menyebutkan faktor mendasar lainnya yang membuat Kudeta Gestapu ini gagal total ialah tidak adanya situasi revolusioner di Indonesia, suatu faktor yang justru menjadi *conditio sine qua non* bagi keberhasilan sebuah revolusi.**MhP**



Peta I : Pangkalan Udara Halim; Markas Besar Para Pemain Utama; Pondok Gede; Lubang Buaya; Komunikasi dan Logistik; 1 Oktober 1965.

- ① Gedung Penas di luar wilayah Pangkalan Angkatan Udara Halim yang digunakan oleh G30S sebagai Cenko I, tanpa izin Kepala Penas/Angkatan Udara. Desa Lubang Buaya digunakan sebagai tempat latihan pasukan sukarela di bawah komando Mayor Udara Soejono, dan kemudian menjadi tempat di mana jenasa para jenderal yang menjadi korban G30S itu ditemukan.
- ② Rumah Sersan Udara Anis Soejatno, anggota Resimen PPP di Kompleks Perumahan bintara, yang telah digunakan oleh G30S sebagai Cenko II.
- ③ Rumah Sersan Udara Soewardi (bintara Pelatih Resimen PPP), yang digunakan sebagai tempat markas D. N. Aidit.

**Beberapa Catatan
tentang Pangkalan Udara Halim
Perdanakusuma
tahun 1965**

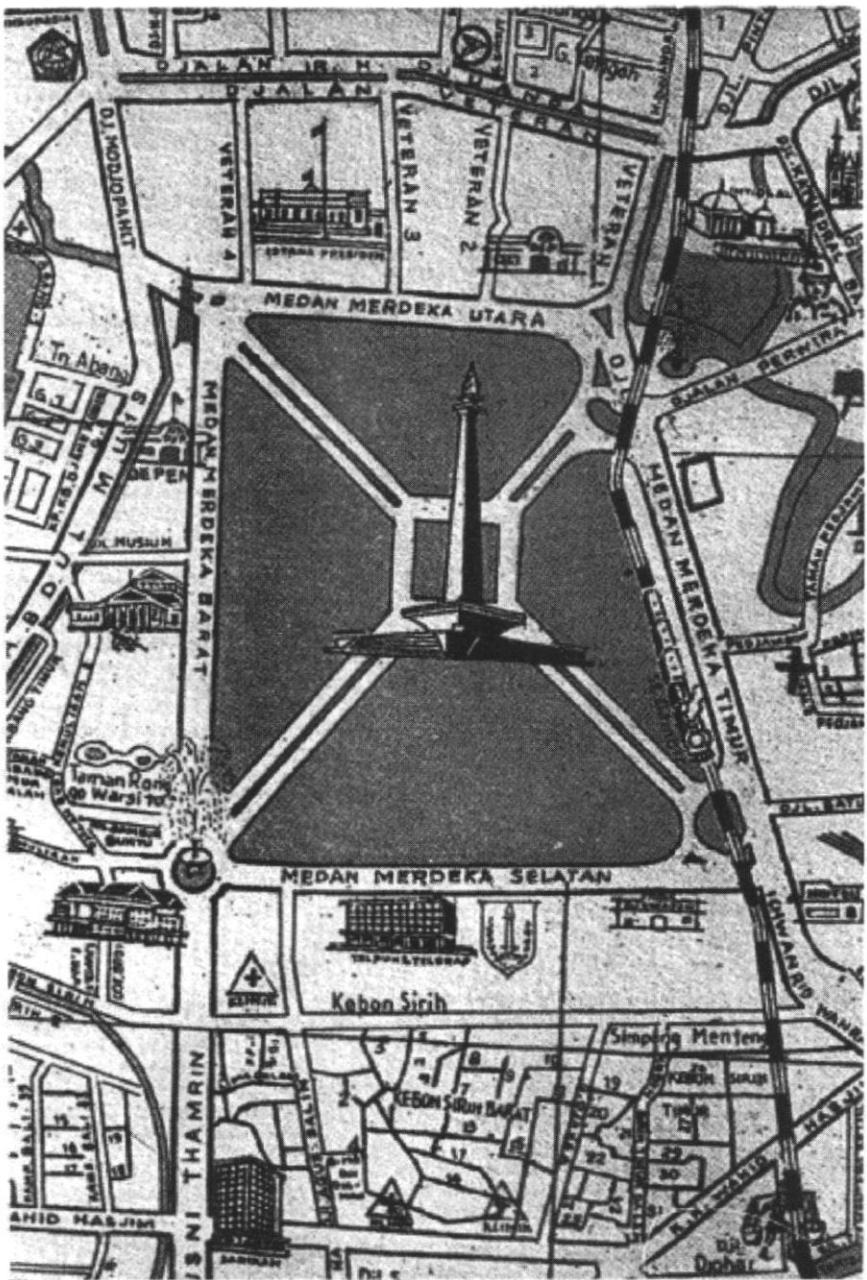
Satu-satunya jalan masuk/keluar melalui desa Kebonpala-Cililitan E atau melalui Kompleks Trikora dekat Jalan Inspeksi

Kali Malang ke Jalan By-Pass E.

- (A) Daerah Koops
Tempat di mana Presiden Sukarno tiba di Halim tanggal 1 Oktober 1965 dan diterima oleh Men/Pangau dan Komandan Koops Rumah Komodor Udara Soesanto, di mana Presiden Sukarno tinggal dan memanggil Waperdam II Dr. Leimena, Para Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata dan Jaksam Agung.
- (B) Pangkalan Ops dan Menara Pangkalan Angkatan Udara PLLU Halim P.
- (C) Daerah Kepolisian Angkatan Udara Halim P.
- (D) Pos Penjagaan Polisi Angkatan Udara pada gapura keluar/masuk Pangkalan Angkatan Udara Halim P., melalui Cililitan.
- (E) Pos Penjagaan Polisi Angkatan Udara pada gapura keluar/masuk Pangkalan Angkatan Udara Halim P., melalui By Pass.
- (F) Lapangan Latihan Pasukan Payung PGT (Daerah Tempat Terjun). Sekarang ini telah dikembangkan menjadi sebuah Lapangan golf Halim I dan Halim II, Daerah Skuadron-465/Paskhasau dan Kompleks Perumahan Angkatan Udara Dirgantara I, II, III.
- (G)

- ⑤ Lokasi Pasukan Raiders/Yon-454 ketika akan bertempur melawan RPKAD (Sekarang ini telah menjadi Kompleks Perumahan Dirgantara III).
- ⑥ Lokasi Pasukan RPKAD ketika siap tempur melawan Yon-454/Raiders (Sekarang ini telah menjadi Wilayah Satharan).

Catatan: Sebuah versi yang lain adalah bahwa RPKAD datang dari arah Hek, padahal dalam kenyataannya pasukan itu datang dari arah Pondok Gede.



Peta II: Medan Merdeka, 1 Oktober 1965